

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Ketika melakukan suatu penelitian, maka dibutuhkan dukungan dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti. Untuk mengetahui adanya hubungan serta perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yang sedang dilakukan, maka dari beberapa hasil penelitian yang ditelaah, yaitu:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Nama Jurnal/DOI	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1	2	3	4	5
1.	Denny Soetrisnaadisendjaja dan Nurkartika Sari (2019) "Fenomena Anak Putus Sekolah di Kawasan Industri Kota Cilegon"	Hermeneutika: Jurnal Hermeneutika/DOI: 10.30870/hermeneutika.v5i2.7383	Untuk menggambarkan kondisi pendidikan khususnya penyebab anak putus sekolah dan dampak setelah mengalami putus sekolah serta untuk mencari makna bagi anak putus sekolah di Kawasan Industri Kota Cilegon	Ada dua faktor penyebab anak putus sekolah, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal disebabkan oleh faktor lingkungan dan faktor ekonomi, sedangkan faktor internal disebabkan oleh keadaan fisik anak yang lemah (sakit). Dampaknya anak merasa kecewa kepada dirinya sendiri dan menyesal. Rendahnya pendidikan membuat anak mengalami kesulitan terutama dalam mencari pekerjaan karena tidak memiliki ijazah. Anak-anak yang putus sekolah memaknai pendidikan sebagai suatu hal yang penting dengan alasan yang berbeda-beda menurut sudut pandangnya masing-masing.

Tabel 2.1 Lanjutan

1	2	3	4	5
2.	<p>Dadang Sepuluh dan Agus Suherman (2019) "Analisis Penyebab Angka Putus Sekolah dan Kondisi Sosial Ekonomi keluarga di Kota Tangerang"</p>	<p>Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah/DOI: 10.33592/pelita.v18i2.45</p>	<p>Untuk mengetahui penyebab angka putus sekolah dan kondisi sosial ekonomi keluarga di Kota Tangerang</p>	<p>Ada empat tingkat sosial ekonomi keluarga berdasarkan dari jenis pekerjaan, yaitu 1) Pekerjaan sebagai pedagang sebanyak 35,7%, 2) Pekerjaan sebagai pemulung 35,7%, 3) Pekerjaan sebagai pembantu 14,3%, dan 4) 11,9% bekerja sebagai buruh pabrik. Penyebab angka putus sekolah di Kota Tangerang ialah: 10 Faktor ekonomi; 2) Kurangnya usaha dari orang tua dalam membujuk anaknya dalam melanjutkan pendidikan; 3) Kurang meratanya pendataan dari pemerintah setempat.</p>
3.	<p>Titik Kamsihyati, Sutomo, dan Sakinah FS (2016) "Kajian Faktor-faktor Penyebab Anak Putus Sekolah di Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap"</p>	<p>Jurnal Geo Edukasi</p>	<p>Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab anak putus sekolah di Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap.</p>	<p>Anak-anak putus sekolah di Desa Jangrana disebabkan oleh: 1) Faktor lingkungan keluarga, yaitu besarnya jumlah anak yang menjadi tanggungan orang tua; 2) Faktor lingkungan sekolah, yaitu sering mengalami konflik dengan sesama teman di sekolah; 3) Faktor lingkungan masyarakat, karena masyarakat tempat ia tinggal mayoritas berpendidikan rendah; 4) Faktor ekonomi dalam bentuk kurangnya penyediaan perlengkapan dan sarana oleh orang tua; 5) Faktor minat, karena anak memilih bekerja daripada melanjutkan sekolah. Faktor yang paling dominan penyebab anak putus sekolah adalah faktor minat.</p>

1	2	3	4	5
4.	<p>Anny Istiqomah, Sukidin, dan Pudjo Suharso (2018) "Analisis Partisipasi Pendidikan pada Masyarakat Miskin Dusun Gumuk Limo Desa Nagosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember"</p>	<p>Jurnal Pendidikan Ekonomi DOI: 10.19184/jpe.v12i2.8553</p>	<p>Untuk mengetahui seberapa besar partisipasi pendidikan dan peran nilai anak dalam partisipasi pendidikan pada penduduk miskin di Dusun Gumuk Limo Desa Nagosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.</p>	<p>Jumlah penduduk miskin yang ada di Dusun Gumuk Limo berjumlah 92 Kepala Keluarga (KK). Penduduk yang termasuk penduduk usia sekolah berjumlah 95 anak yang diperoleh dari 92 orang responden dengan APK kategori tinggi pada jenjang SD-SMA/SMK. Sedangkan pada APM jenjang SD-SMA/SMK kategori tinggi dan PT termasuk kategori rendah. Nilai anak menurut responden, yaitu sebagai manfaat ekonomi, jaminan di masa tua, dan untuk meningkatkan status sosial masyarakat.</p>
5.	<p>Endan Suwandana (2018) "Tingkat Partisipasi Sekolah dan Indikator Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Banten"</p>	<p>Jurnal Lingkar Widyaiswara</p>	<p>Untuk menelaah mengenai hubungan antara tingkat perekonomian suatu daerah dengan tingkat partisipasi sekolah penduduknya.</p>	<p>Perekonomian daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten memiliki hubungan (walaupun tidak terlalu signifikan) dengan tingkat partisipasi sekolah SMA yang diindikasikan dengan nilai koefisien determinasi antara 0,56 – 0,64; tetapi tidak memiliki hubungan dengan tingkat partisipasi ke jenjang perguruan tinggi. Artinya semakin tinggi perekonomian suatu daerah, maka semakin banyak anak bersekolah tingkat SMA, tetapi belum tentu mereka melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi.</p>

1	2	3	4	5
6.	Boy Ampristi dan Yaya Setiadi (2020) "Ketahanan Bersekolah Penduduk Usia Sekolah 7–18 tahun di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017"	Jurnal Seminar Nasional <i>Official Statistics</i> " DOI: 10.34123/semnasof fstat.v2019i1.187	Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan bersekolah penduduk daerah perdesaan dan perkotaan pada usia 7–18 tahun di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017.	Persentase putus sekolah pada penduduk usia sekolah 7–18 tahun di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017, baik di perdesaan maupun di perkotaan lebih banyak terjadi pada penduduk yang berjenis kelamin laki-laki, tidak menerima bantuan KIP, jenis kelamin KRT perempuan, jumlah anggota rumah tangga lebih dari 4 orang, tingkat pendidikan KRT hanya sampai pendidikan dasar, KRT bekerja di bidang pertanian, status kemiskinan miskin dan status orangtua tunggal. Ketahanan bersekolah pada penduduk usia sekolah 7–18 tahun yang tinggal di daerah perdesaan lebih baik dari pada penduduk yang tinggal di daerah perkotaan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017.
7.	Efri Diah Utami dan Febri Wicaksono (2019) "Determinan Partisipasi Sekolah Di Indonesia: Analisis Data Susenas tahun 2017"	Jurnal Ilmiah WIDYA Non-Eksakta Volume 1 Nomor 1 Mei 2019	Mengidentifikasi beberapa karakteristik individu dan rumah tangga yang dapat memengaruhi partisipasi sekolah di Indonesia.	Penduduk usia 7–18 tahun di Indonesia didominasi oleh penduduk yang sekolah (92,4 persen), memiliki kepala rumah tangga dengan pendidikan rendah (47,9 persen), memiliki kesejahteraan sedang (50,3 persen), tidak memiliki pekerjaan (94,2 persen), dan berjenis kelamin laki-laki (51,7 persen). Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi bersekolah yaitu pendidikan kepala rumah tangga, kesejahteraan, status bekerja, tempat tinggal, dan jenis kelamin.

1	2	3	4	5
8.	Amalia Pangesti Arum dan Melti Roza Adry (2020) "Analisis Determinan Partisipasi Sekolah di Provinsi Jambi"	Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan/ DOI: https://doi.org/10.24036/eecosains.11549557.00	Mengetahui dan menganalisis determinan partisipasi sekolah di Provinsi Jambi .	Secara parsial (1) umur serta pendidikan orang tua berpengaruh signifikan terhadap partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar 7–15 tahun, sedangkan biaya pendidikan, jenis kelamin, pendapatan rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, dan daerah tempat tinggal tidak berpengaruh signifikan terhadap partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar umur 7–15 tahun di Provinsi Jambi; (2) biaya pendidikan, umur, jenis kelamin, pendidikan orang tua, dan daerah tempat tinggal berpengaruh signifikan terhadap partisipasi sekolah jenjang pendidikan menengah umur 16–18 tahun dan pendidikan tinggi umur 19–24 tahun, sedangkan pendapatan rumah tangga dan jumlah anggota rumah tangga tidak memiliki pengaruh signifikan.
9.	Hesti Pudyastuti dan Euis Mulyaningsih (2021) "Pengaruh Ketersediaan Sarana Pendidikan terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kota Cilegon"	Equilibrium: Jurnal Pendidikan/ DOI: 10.26618/equilibrium.v9i1.4424	Untuk mengetahui persentase ketersediaan sarana pendidikan di Kota Cilegon, serta pengaruhnya terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK).	Ketersediaan sarana pendidikan berdasarkan jumlah penduduk rata-rata telah cukup memadai, yaitu sudah 70% kecuali jenjang TK yaitu baru terpenuhi sebesar 51,18% sehingga masih perlu ditingkatkan. Ketersediaan sarana pendidikan jenjang SD terpenuhi sebesar 71,36 %, jenjang SMP terpenuhi sebesar 92,22 % dan jenjang SMA terpenuhi sebesar 76,85 %. Sedangkan ketersediaan sarana pendidikan di Kota Cilegon yang dihitung berdasarkan jumlah anak usia sekolah, pada jenjang TK terpenuhi sebesar 60,72 %, jenjang SD terpenuhi sebesar 98,98 %, jenjang SMP terpenuhi sebesar 97,85 %, dan jenjang SMA terpenuhi sebesar 88,11 %.

1	2	3	4	5
10.	Arsi Surya Prasanta, Saptono Putro, dan Wahyu Setyaningsih (2015) "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Melanjutkan Sekolah SMA/Sederjad di Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Tahun 2017"	Jurnal Edu Geography	Untuk mengetahui terdapatnya pengaruh kondisi sosial-ekonomi, aksesibilitas, dan motivasi terhadap partisipasi melanjutkan sekolah ke SMA di Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Tingkat aksesibilitas siswa menuju sekolah SMA rata-rata tergolong sedang. Tingkat aksesibilitas berpengaruh signifikan terhadap partisipasi melanjutkan sekolah SMA; 2) Tingkat motivasi berpengaruh signifikan terhadap partisipasi melanjutkan SMA; 3) Kondisi sosial-ekonomi yaitu pada tingkat pendidikan orang tua, jenis pekerjaan, dan tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap partisipasi melanjutkan sekolah ke SMA di Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal.
11.	Jolianis Koto (2015) "Pengaruh Alokasi Anggaran Sektor Pendidikan, Pendapatan Perkapita, dan Pendidikan Kepala Rumah Tangga terhadap Angka Partisipasi Sekolah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat"	Journal of Economic and Economic Education/DOI: 10.22202/economic a.2015.v3.i2.254	Untuk mengetahui dan menganalisis: 1) Pengaruh anggaran sektor pendidikan terhadap angka partisipasi sekolah; 2) Pengaruh pendapatan perkapita terhadap angka partisipasi sekolah; 3) Pengaruh tingkat pendidikan kepala rumah tangga terhadap angka partisipasi sekolah.	1) Terdapat pengaruh yang signifikan dari pendapatan perkapita terhadap angka partisipasi sekolah; 2) Terdapat pengaruh yang signifikan dari pendapatan perkapita terhadap angka partisipasi sekolah; 3) Terdapat pengaruh yang signifikan dari tingkat pendidikan kepala keluarga terhadap angka partisipasi sekolah.
12.	Eka Rakhmawati dan Bondan Satriawan (2019) "Pengaruh Bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) terhadap Harapan Sekolah di Provinsi Jawa Timur tahun 2017"	Jurnal Media Trend: Berkala Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan/DOI: 10.21107/mediatrend.v14i2.5799	Untuk mengetahui determinan dan menganalisis pengaruh Bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) terhadap harapan sekolah di Provinsi Jawa Timur.	Pengaruh Kartu Indonesia Pintar (KIP) terhadap partisipasi sekolah pada tahun ajaran sebelumnya (2015/2016) relatif tinggi. Karakteristik rumah tangga juga berpengaruh terhadap partisipasi sekolah yaitu tingkat pendidikan kepala rumah tangga dan status pekerjaan kepala rumah tangga. Status pekerjaan kepala rumah tangga tidak berpengaruh signifikan terhadap partisipasi sekolah di Jawa Timur.

1	2	3	4	5
13.	Riri Tia Rutfiana dan Banatul Hayati (2020) "Analisis Pengaruh Pemberian Dana Pendidikan Bantuan Operasional (BOS) terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017"	Dipenogoro Journal of Economics	Untuk menganalisis pengaruh program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) anggaran pendidikan, Perkapita PDRB dan Angka Partisipasi Kasar pada tahun sebelumnya di SD, SMP, dan SMA di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017.	Hasil menunjukkan bahwa pengaruh pemberian dana pendidikan BOS berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan SMA. Anggaran pendidikan juga berpengaruh dalam peningkatan nilai APK hal ini berarti alokasi anggaran pendidikan membantu kelancaran proses belajar mengajar dan membantu pemenuhan biaya untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. PDRB perkapita terbukti mampu mendorong masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam bidang pendidikan pada jenjang pendidikan lanjutan setingkat SMP dan SMA.
14.	Jusmareni, Zulfan Saam, dan Almasdi Syahza (2018) "Evaluasi Program SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) Kabupaten Kampar dalam Menanggulangi Pendidikan Anak Putus Sekolah"	Jurnal Manajemen Pendidikan Penelitian Kualitatif/DOI: 10.31258/jmppk.2.1.p.209-218	Untuk mengungkap, menganalisa, dan mengevaluasi program SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) dalam menanggulangi Pendidikan anak putus sekolah di Kabupaten Kampar.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Kampar dalam menanggulangi pendidikan anak putus sekolah mulai dari evaluasi komponen konteks, input, proses dan produk berada pada kategori baik karena dari empat komponen yang di evaluasi hanya terdapat satu komponen yang berada pada kategori kurang baik yaitu pada komponen proses. Pelaksanaan program SKB ini sangat membantu dalam meminimalisasi angka putus sekolah di Kabupaten Kampar. Evaluasi pada program SKB dalam penelitian ini memfokuskan pada program Kejar Paket C.

1	2	3	4	5
15.	Ni Putu Primadewi Pendit, Made Kembar Sri Budhi, dan A.A.I Ngurah Marhaeni (2016) "Efektifitas dan Dampak Pelaksanaan Program Beasiswa Miskin dan Berprestasi (BIDIK SIMISI) terhadap Angka Putus Sekolah dan Angka Partisipasi Murni Di Provinsi Bali"	E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana/DOI: 10.4324/97802037 80930	Untuk menganalisis efektifitas dan dampak pelaksanaan program Beasiswa Miskin dan Berprestasi (BIDIK SIMISI) terhadap angka putus sekolah dan angka partisipasi murni di Bali.	1) Tingkat efektifitas pelaksanaan program dari segi <i>input</i> dan <i>output</i> tergolong efektif; 2) Pelaksanaan program BIDIK SIMISI tidak berdampak signifikan terhadap angka putus sekolah; 3) Pelaksanaan program BIDIK SIMISI tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan angka partisipasi murni di Provinsi Bali pada tahun pertama pelaksanaannya, sedangkan pada tahun kedua dan ketiga pelaksanaannya berdampak positif terhadap angka partisipasi murni.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada fokus penelitian. Dari hasil penelitian terdahulu terbagi menjadi tiga topik, yaitu topik anak putus sekolah, partisipasi sekolah, dan program pelayanan dasar bidang pendidikan. Topik pertama mengenai anak putus sekolah, peneliti yang sama-sama membahas mengenai topik tersebut yaitu: 1) Denny Soetrisnaadsendjaja dan Nurkartika Sari; 2) Dadang Sepuluh dan Agus Suherman; 3) Titik Kamsihyati, Sutomo, dan Sakinah FS. Tetapi, yang membedakan dengan penelitian ini yaitu peneliti tidak turun langsung ke lapangan sehingga peneliti menggunakan data secara studi literatur. Data tersebut peneliti dapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada anak usia sekolah 7–18 tahun. Selain itu, lokasi penelitian peneliti yaitu di Kabupaten Brebes Jawa Tengah. Sedangkan pada penelitian terdahulu sebagian besar turun langsung ke lapangan untuk mengetahui faktor penyebab anak putus sekolah.

Topik kedua mengenai partisipasi sekolah, peneliti yang sama-sama membahas mengenai topik tersebut yaitu: 1) Anny Istiqomah, Sukidin, dan Pudjo Suharso; 2) Endan Suwandana; 3) Boy Impristi dan Yaya Setiadi; 4) Efri Diah Utami dan Febri Wicaksono; 5) Amalia Pangesti Arum dan Melti Roza Adry; 6) Hesti Pudyastuti dan Euis Mulyaningsih; 7) Arsi Surya Prasanta, Saptono Putro, dan Wahyu Setyaningsih; dan 8) Jolianis Koto. Tetapi, yang membedakan dengan penelitian ini yaitu untuk menganalisis peningkatan partisipasi bersekolah anak putus sekolah. Sedangkan, pada penelitian terdahulu sebagian besar membahas mengenai hubungan partisipasi bersekolah atau ketahanan bersekolah dengan indikator ekonomi, ketersediaan sarana pendidikan, serta anggaran alokasi sektor pendidikan.

Topik ketiga mengenai program pelayanan bidang pendidikan, peneliti yang sama-sama membahas mengenai topik tersebut yaitu: 1) Eka Rakhmawati dan Bondan Satriawan; 2) Ririh Tia Rutfiana dan Banatul Hayati; 3) Jusmareni, Zulfan Saam, dan Almasdi Syahza; 4) Ni Putu Primadewi, Made Kembar Sri Budhi, dan A.A.I Ngurah Marhaeni. Meskipun sama-sama membahas mengenai perbaikan akses pelayanan di bidang pendidikan untuk mengurangi anak putus sekolah, tetapi belum ada penelitian yang berfokus pada program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) dan penelitian tersebut hanya membahas mengenai pendidikan gratis yang diselenggarakan pada jalur formal. Program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) tidak hanya diselenggarakan pada jalur formal saja, tetapi program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) juga diselenggarakan pada jalur non-formal. Sedangkan yang membedakan dengan penelitian terdahulu, pada penelitian ini

mengkaji efektifitas dan dampak dari program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) terhadap partisipasi bersekolah anak putus sekolah serta melihat faktor yang menghambat dalam pelaksanaan program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) di Kabupaten Brebes.

2.2. Kerangka Teori

2.2.1. Konsep Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial dalam artian secara luas yaitu mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. Taraf kehidupan yang baik ini tidak hanya diukur secara ekonomi dan fisik, tetapi juga ikut memperhatikan dalam aspek sosial, mental, dan segi kehidupan.

Konsep yaitu sekumpulan kata yang memiliki suatu gagasan. Di Indonesia, konsep kesejahteraan sosial telah lama dikenal dan tercantum di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Tetapi, beberapa dari konsep-konsep dasar dalam lingkup bidang kesejahteraan sosial yang ada di Indonesia masih begitu beragam tergantung dari sudut pandang yang mengartikannya.

2.2.1.1. Pengertian Kesejahteraan Sosial

Dalam wacana global ataupun nasional, istilah kesejahteraan sosial bukanlah suatu hal yang baru. Dengan menggunakan pengertian dasar dari konsep 'sosial', maka konsep kesejahteraan sosial dapat dipandang dari empat sisi, yaitu:

1. Sebagai Suatu 'Sistem Pelayanan Sosial'

Menurut Elizabeth Wickenden (dalam Friedlander, 1974:4) mendefinisikan kesejahteraan sosial, sebagai:

Suatu sistem perundang-undangan, kebijakan, program, pelayanan, dan bantuan; untuk menjamin pemenuhan kebutuhan sosial yang dikenal sebagai kebutuhan dasar bagi kesejahteraan manusia dan bagi berfungsinya ketertiban sosial secara lebih baik.

Dari definisi tersebut mengandung tiga hal, yaitu:

- a. Konsep pelayanan sosial (bidang praktek Pekerjaan Sosial) yaitu mencakup aktivitas yang sangat luas, mulai dari perundang-undangan sosial sampai kepada tindakan langsung pemberian bantuan.
- b. Konsep 'Kesejahteraan Sosial' yaitu terpenuhinya kebutuhan sosial (kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan) menjadi dasar bagi terciptanya 'kesejahteraan' (sebagai keadaan yang baik dalam berbagai aspek kehidupan manusia).
- c. Pada tingkat masyarakat, kesejahteraan sosial berarti terdapat ketertiban sosial (*social order*) yang lebih baik.

Menurut Walter A. Friedlander mengemukakan bahwa kesejahteraan sosial ialah:

Sistem yang terorganisasi dari usaha-usaha sosial dan lembaga-lembaga sosial yang ditujukan untuk membantu individu maupun kelompok dalam mencapai taraf hidup dan kesehatan yang memuaskan, serta untuk mencapai relasi perseorangan dan sosial yang dapat memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan-kemampuan mereka secara penuh, serta untuk mempertinggi kesejahteraan mereka, selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Di Indonesia, pada umumnya istilah kesejahteraan sosial diartikan hanya sebatas sebuah kondisi yang sejahtera. Oleh karena itu, pengertian kesejahteraan sosial sebagai suatu aktivitas disebut dengan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS), sedangkan di Indonesia Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) lebih dikenal sebagai Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PKS). Secara umum, istilah kesejahteraan

sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, misalnya yang bersifat mendasar yaitu makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan.

Pengertian kesejahteraan sosial juga menunjuk pada segenap aktivitas pengorganisasian dan pendistribusian pelayanan sosial bagi suatu kelompok masyarakat, terutama kelompok yang kurang beruntung (*disadvantaged groups*). Menurut Spicker (1995), Midgley, Tracy dan Livermore (2000), Thompson (2005), Suharto (2006a), dan Suharto (2006b), pengertian kesejahteraan sosial mengandung empat makna yaitu:

1. Sebagai kondisi yang sejahtera (*well-being*). Pengertian tersebut biasa merujuk pada istilah kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan baik kebutuhan material maupun non-material. Menurut Midgley et.al (2000:xi) dalam mendefinisikan kesejahteraan sosial yaitu sebagai "...kondisi atau suatu keadaan kesejahteraan manusia". Kondisi sejahtera tersebut terjadi apabila kehidupan manusia aman serta bahagia dikarenakan kebutuhan dasar terpenuhi; serta jika manusia mendapatkan perlindungan dari resiko-resiko yang dapat mengancam kehidupannya.
2. Sebagai pelayanan sosial. Pada umumnya pelayanan sosial yang ada di Inggris, Australia, dan Selandia Baru mencakup lima bentuk, yaitu jaminan sosial (*social security*), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (*personal social services*).

3. Sebagai tunjangan sosial. Di Amerika Serikat (AS) tunjangan sosial diberikan kepada orang miskin. Karena beberapa penerima *welfare* di Amerika Serikat (AS) yaitu orang-orang miskin, cacat, dan penganggur. Sehingga, keadaan ini sering menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, terutama terjadi karena kesejahteraan sosial seringkali diartikan sebagai tunjangan sosial untuk orang miskin saja.
4. Sebagai proses atau usaha yang terencana oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah guna meningkatkan kualitas hidup serta menyelenggarakan pelayanan sosial.

Dengan demikian jika melihat kondisi tersebut, maka upaya dalam mewujudkan kesejahteraan sosial sesungguhnya dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha, maupun *civil society* yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dengan kebijakan dan program yang bekerjasama dengan pelayanan sosial, penyembuhan sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat.

2. Sebagai Suatu Disiplin Keilmuan

Sebagai suatu disiplin keilmuan, kesejahteraan sosial tidak dapat mempelajari seluruh aspek kehidupan manusia, tetapi harus memilih dan membatasi kajian (*focus of interest*) pada satu aspek kehidupan manusia. Sebutan konsep 'sosial' hanya terhadap pada aspek kehidupan sosial manusia dengan segala perangkat sistem sosial dan dinamikanya. Sudut kajian yang membedakan bidang kesejahteraan sosial dengan bidang-bidang ilmu lainnya terletak pada konsep

‘sosial’, yang pengertian dasarnya yaitu hubungan (interaksi) yang terjadi antar manusia.

3. Sebagai Suatu Keadaan Hidup

Merujuk pada pengertian konsep sosial yang telah disampaikan terdahulu, maka kesejahteraan sosial mengacu pada “suatu keadaan antar hubungan manusia yang baik atau yang kondusif bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri”. Dari pengertian tersebut maka dapat dijelaskan beberapa hal, yaitu:

- a. Konsep ‘baik’ pada antar hubungan manusia dapat diukur dari standar nilai-nilai sosial (*social values*) serta norma-norma (*norms*) yang ada di tatanan kehidupan bermasyarakat dan perilaku warga masyarakatnya.
- b. Konsep manusia, yang ditujukan kepada individu-individu dan unit-unit sosial seperti kelompok, organisasi, maupun masyarakat.
- c. Bersifat kondusif, bahwa pada hubungan sosial tersebut merupakan wujud dari tatanan atau ketertiban sosial (*social order*) yang memberikan kesempatan kepada setiap warga masyarakatnya agar berusaha mencapai kesejahteraan hidupnya.
- d. Memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya setiap warga masyarakat dimungkinkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya secara mandiri sesuai dengan kemampuannya sendiri.

4. Sebagai Suatu Tatanan atau Ketertiban Sosial (*Social Order*)

Sejalan dengan definisi Kesejahteraan Sosial, maka Kesejahteraan sosial dipandang sebagai suatu tatanan di dalam masyarakat yang bersifat kondusif bagi setiap warga negara untuk melakukan suatu upaya agar memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selain itu, adanya interaksi yang terjadi di antara setiap individu warga masyarakat merupakan suatu upaya warga masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Hal tersebut selaras dengan wujud konsep Kesejahteraan Sosial yaitu adanya pengadaan dan penataan berbagai kebijakan sosial, perencanaan sosial, program-program, serta penyelenggaraan di berbagai bidang pelayanan sosial. Komponen sosial dari kehidupan manusia (interaksi sosial) merupakan fokus kajian Kesejahteraan Sosial sebagai suatu disiplin ilmu.

Dengan demikian, kesejahteraan sosial mengandung beberapa makna yang berbeda, walaupun substansinya sama. Pada intinya Kesejahteraan Sosial mencakup tiga konsepsi, yaitu:

1. Kondisi kehidupan atau keadaan yang sejahtera, yaitu terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniyah, dan sosial.
2. Institusi yang bidang kegiatannya melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial serta pelayanan sosial.
3. Aktivitas, yaitu kegiatan-kegiatan yang terorganisir untuk mencapai kondisi yang sejahtera.

2.2.1.2. Fungsi-fungsi Kesejahteraan Sosial

Fungsi kesejahteraan sosial yaitu bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang disebabkan oleh terjadinya perkembangan sosial ekonomi. Ketidaksiapan seseorang dalam menghadapi perkembangan tersebut dapat menjadi salah satu faktor terjadinya masalah sosial. Dari definisi kesejahteraan sosial sebagai sebuah bidang kajian keilmuan, maka fungsi-fungsi utama kesejahteraan sosial, sebagai berikut:

- a. Mengkaji keadaan sosial masyarakat
- b. Mengantisipasi perubahan sosial masyarakat dengan prediksi terhadap *chain-effect*.
- c. Mengendalikan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.

Dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, maka bidang kesejahteraan sosial memiliki tugas-tugas untuk:

- a. Pengembangan ilmunya sendiri.
- b. Perumusan kebijakan-kebijakan sosial.
- c. Pengembangan pelayanan-pelayanan sosial yang ada di masyarakat.

2.2.2. Konsep Pekerja Sosial

Pekerjaan sosial merupakan suatu profesi kemanusiaan yang sudah ada cukup lama. Menurut Zastrow (1999); Zastrow (2000); dan Shulman (2000) sejak adanya pekerjaan sosial sekitar tahun 1800-an, pekerjaan sosial terus mengalami perkembangan sejalan dengan keadaan, kebudayaan, aspirasi, maupun

perkembangan masyarakat yang selalu berubah. Sebagai suatu profesi pemberian bantuan, maka makna Pekerjaan Sosial bukanlah sebagai kegiatan amal, tetapi sebagai sebuah disiplin dan pendekatan profesional. Pekerjaan sosial diartikan sebagai suatu profesi atau keahlian yang didasari oleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang didapatkan melalui pendidikan formal dan pengalaman praktik aktual di bidang pertolongan kemanusiaan.

Peran utama pekerja sosial yaitu memberikan pelayanan sosial kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang membutuhkannya sesuai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai profesional pekerjaan sosial. Sebagai pekerjaan sosial profesional, maka didasari oleh tiga komponen dasar sebagai integratif dalam membentuk profil dan pendekatan pekerjaan sosial yaitu, kerangka pengetahuan (*body of knowledge*), kerangka keahlian (*body of skills*), dan kerangka nilai (*body of values*). Adapun metoda penyembuhan sosial (*social treatment*) yang dilakukan oleh pekerjaan sosial secara garis besar terdiri atas pendekatan mikro dan makro. Profesi pekerjaan sosial membantu mendorong pemecahan masalah yang berkaitan dengan relasi kemanusiaan, perubahan sosial, pemberdayaan dan pembebasan manusia, dan perbaikan masyarakat.

2.2.2.1. Pengertian Pekerja Sosial

Menurut Morales (2002) dalam bukunya yang berjudul *Social Work a Profession of many Faces*, bahwa dalam mendefinisikan pekerjaan sosial terdapat empat faktor yang perlu perhatian sebagai berikut:

1. Di setiap pertolongan, pekerja sosial memberikan fasilitas agar terjadinya perubahan yang direncanakan.
2. Pekerjaan sosial berusaha membantu individu, keluarga, kelompok organisasi, dan komunitas dalam memperbaiki dan menangani keberfungsian sosialnya (*social functioning*).
3. Konsep-konsep teori sistem yang dipergunakan oleh pekerja sosial dalam membantu orang agar dapat berinteraksi sosial dengan lebih efektif.
4. Pekerja sosial harus mampu memberikan bantuan dalam memberikan bantuan dan memperbaiki fungsi sosial seseorang guna memperoleh sumber-sumber yang dibutuhkannya.

Empat faktor tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mendefinisikan pekerjaan sosial, bahwa pekerjaan sosial merupakan suatu aktivitas memberikan bantuan yang direncanakan guna menghasilkan suatu perubahan, dapat memecahkan masalah yang sedang dihadapi, serta dapat menjalankan tugas-tugas kehidupan dan fungsi sosialnya dengan lebih baik. Menurut Walter A. Friedlander dalam bukunya yang berjudul *Introduction to Social Welfare* (2002) mendefinisikan pekerjaan sosial sebagai:

Pekerjaan sosial sebagai suatu pelayanan profesional yang didasari pada pengetahuan ilmiah dan keterampilan dalam hubungan kemanusiaan yang membantu individu-individu secara perorangan maupun dalam kelompok, guna mencapai kepuasan dan kebebasan sosial dan pribadi.

Pada dasarnya, definisi tersebut memfokuskan bahwa pekerjaan sosial yaitu suatu profesi pelayanan sosial kepada individu, kelompok, serta masyarakat yang didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan ilmiah mengenai relasi manusia,

serta bertujuan untuk mencapai kepuasan pribadi, kepuasan sosial, dan kebebasan. Menurut Friedlander, inti dari profesi pekerjaan sosial yaitu relasi atau interaksi antar manusia.

Menurut Allen Pincus dan Anne Minahan, mendefinisikan pekerjaan sosial sebagai:

Pekerjaan sosial berhubungan dengan interaksi antara orang-orang dan lingkungan sosial, sehingga mereka dapat melakukan tugas-tugas kehidupannya, mengurangi ketegangan, serta mewujudkan aspirasi dan nilai-nilai mereka.

Menurut Pincus dan Minahan fokus dari pekerjaan sosial sebagaimana dari definisi diatas yaitu interaksi orang dengan lingkungan sosialnya agar mampu menyelesaikan tugas kehidupan mereka, mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi, dan mewujudkan aspirasi dan nilai-nilai mereka.

Menurut Siporin, Max mendefinisikan pekerjaan sosial sebagai:

Pekerjaan sosial didefinisikan sebagai suatu metode institusi sosial guna membantu orang-orang dalam mencegah dan menyelesaikan masalah sosial dengan meningkatkan dan memperbaiki keberfungsian sosialnya. (Siporin, Max *Introduction to Social Work Practice*, 1957:3)

Sedangkan menurut Leonara Scrafica-de Guzman mendefinisikan pekerjaan sosial sebagai:

Pekerjaan sosial sebagai suatu profesi yang berkecimpung dalam kegiatan pelayanan sosial yang terorganisasi, dengan tujuannya yaitu untuk memfasilitasi dan memperkuat relasi dalam penyesuaian diri secara timbal balik dan saling menguntungkan antar individu dengan lingkungan sosialnya, dengan menggunakan metode-metode pekerjaan sosial. (Leonara Scrafica-de Guzman, *Fundamentals of Social Work*, 1983:3)

Pada prinsipnya, definisi di atas menekankan, bahwa pekerjaan sosial yaitu suatu profesi memberikan pelayanan sosial; yang dilaksanakan oleh suatu lembaga atau organisasi sosial; serta memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan relasi antara

individu dengan lingkungan sosialnya dengan menggunakan metode pekerjaan sosial yang tepat.

Berbagai definisi mengenai pekerjaan sosial yang telah dikemukakan di atas, maka secara garis besar pekerjaan sosial dapat dipandang sebagai:

1. Praktik pekerjaan sosial merupakan suatu seni di dalam pekerjaan sosial, karena dalam praktiknya pekerja sosial membutuhkan keterampilan-keterampilan yang tinggi untuk membantu mereka agar memiliki kemampuan untuk menolong diri mereka sendiri, selain itu keterampilan-keterampilan praktik yang dimiliki pekerja sosial juga digunakan untuk memahami orang-orang lain.
2. Pekerjaan sosial sebagai suatu ilmu, pekerja sosial memiliki suatu metode-metode yang digunakan ketika memecahkan masalah yang dilakukan secara objektif guna menemukan dan memahami fakta-fakta.
3. Pekerjaan sosial sebagai suatu bidang profesi, karena di masa dewasa ini pekerjaan sosial telah memiliki dan memenuhi syarat-syarat suatu profesi.

Pekerja sosial sekolah merupakan salah satu bidang praktik pekerjaan sosial yang bekerja di lingkungan sekolah. Pekerja sosial sekolah memberikan pelayanan berupa konseling (*counseling*), tes kemampuan pendidikan (*educational testing*), pengelolaan perilaku (*behavior management*), dan konseling keluarga (*counseling family*). Menurut Rustanto (2013), pekerja sosial sekolah juga membantu perwujudan hak-hak semua anak terhadap pendidikan termasuk bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus serta keluarganya.

2.2.2.2. Kerangka Profesi Pekerjaan Sosial

A. Kriteria Profesi

Membahas kriteria profesi merupakan suatu pembahasan yang sangat penting, karena dengan mengetahui kriteria dari profesi kita maka dapat mengukur sampai sejauh mana suatu bidang keahlian dikatakan sebagai suatu profesi. Werner Boehm menyatakan bahwa yang membedakan suatu profesi dengan yang bukan suatu profesi, yaitu:

1. Suatu profesi memiliki tanggung jawab kepada masyarakat atau kepentingan umum yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Memiliki *body of knowledge*
3. Mempunyai *Body of value* dan *Body of skill*
4. Anggota profesi harus menyadari bahwa dirinya memiliki pengetahuan, nilai, dan sikap serta keterampilan yang harus dijunjung tinggi dan dikembangkan.

William Wickenden memaparkan bahwa suatu bidang keahlian dapat dikatakan sebagai suatu profesi apabila memenuhi syarat-syarat, yaitu:

1. Memiliki *Body of knowledge (science)* dan *art (skill)*
2. Mengikuti proses pendidikan
3. Memiliki kode etik
4. Pengakuan status
5. Wadah atau organisasi.

Pada dasarnya suatu profesi memiliki kerangka pengetahuan, kerangka nilai, dan kerangka keterampilan yang sistematis yang diajarkan melalui pendidikan formal.

B. Kerangka Pengetahuan, Nilai, dan Pengetahuan Pekerja Sosial

1) Kerangka Pengetahuan (*Body of Knowledge*)

Dalam memberikan pelayanan kepada klien, pekerja sosial harus menggunakan pengetahuan-pengetahuan ilmiah yang sudah teruji validitasnya.

Pengetahuan (*knowledge*) dapat diartikan sebagai berikut:

Pengetahuan umumnya dapat didefinisikan sebagai perkenalan dengan teori atau pemahaman praktis dari cabang yang sama atau ilmu pengetahuan, seni, belajar atau lainnya adalah mencintai studi, penelitian, atau praktis dan akuisisi keterampilan. (Morales dan Sheafor, 1983)

Marry Richmod (1917) mengelompokkan pengetahuan pekerjaan sosial kedalam tiga golongan, yaitu:

1. Pengetahuan tentang klien
2. Pengetahuan tentang lingkungan sosial
3. Pengetahuan tentang suatu profesi.

Alfred Kadusin mengelompokkan lima tingkat pada pengetahuan pekerja sosial, yaitu:

1. Pengetahuan pekerjaan umum (pelayanan dan kebijakan sosial) dan metode pekerjaan sosial
2. Pengetahuan spesifik mengenai bidang praktik
3. Pengetahuan spesifik mengenai badan-badan sosial
4. Pengetahuan spesifik tentang klien
5. Pengetahuan spesifik tentang kontak.

2) Kerangka Nilai (*Body of Value*)

Nilai dalam literatur pekerja sosial memiliki pengaruh yang sangat besar dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial. Nilai-nilai yang mempengaruhi pekerja sosial dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sebagai berikut:

1. Nilai pribadi pekerja sosial
2. Nilai profesi pekerja sosial
3. Nilai klien atau kelompok klien
4. Nilai masyarakat

Pada dasarnya sumber nilai pekerjaan sosial secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu:

1. Nilai masyarakat (*societal values*), profesi pekerjaan sosial harus selaras dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, karena dalam praktiknya selalu berdasarkan dengan nilai-nilai masyarakat guna melaksanakan sebagian dari fungsi-fungsi yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, praktik pekerjaan sosial akan dipengaruhi oleh nilai-nilai masyarakat.
2. Kode etik, merupakan suatu tuntutan yang mengatur hal-hal tentang perilaku yang baik dan yang perlu ditunjukkan oleh anggota profesi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Tujuan dan fungsi kode etik ialah:
 - a. Melindungi reputasi profesi dengan memberikan kriteria yang dapat diikuti guna mengatur tingkah laku anggota profesi,

- b. Meningkatkan kompetensi dan kesadaran tanggung jawab dalam melaksanakan praktik,
 - c. Melindungi masyarakat dari praktik yang tidak kompeten.
3. *Agency Purpose*, pekerja sosial harus mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam lembaga di mana pekerja sosial tersebut bekerja.
4. Teori, setiap teori dari suatu profesi memiliki suatu nilai. Nilai teori pada pekerjaan sosial dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu:
- a. Nilai tentang konsepsi orang,
 - b. Nilai tentang masyarakat,
 - c. Nilai yang berkaitan dengan interaksi antar orang.

Ketika berinteraksi dengan kliennya maka pekerja sosial dituntut untuk mengenali, menginternalisasikan, dan memahami beberapa nilai sebagai berikut:

1. **Penerimaan (*Acceptance*)** menurut Plant (1970) prinsip pekerja sosial yang fundamental, yaitu dengan menunjukkan sikap toleran terhadap keseluruhan dimensi klien. Pekerja sosial menerima klien dengan segala kekuatan dan kelemahan perilakunya dengan bermartabat dan penuh penghargaan. *Acceptance* berimplikasi pada terbentuknya kekuatan klien dan memunculkan potensi untuk tumbuh dan berkembang (Biestek, 1975).
2. ***Non judgemental***, pekerja sosial menerima klien dengan apa adanya tanpa adanya prasangka atau penilaian. Pekerja sosial menerima klien dengan segala keadaannya, tidak menilai perilaku, dan tidak memaksakan nilai-nilai yang

dimiliki oleh pekerja sosial kepada klien. Sikap tersebut akan memunculkan perasaan klien yang bebas untuk membuka dirinya tanpa merasa takut akan diinterupsi atau dikritisi, sehingga klien memiliki kesempatan mengembangkan kesadaran dirinya untuk merekonstruksi sikapnya.

3. **Individualisasi**, setiap klien memiliki karakteristik kepribadian dan permasalahan yang unik dan berbeda dengan setiap individu lainnya. Keunikan tersebut dibentuk oleh suatu pengalaman, kebutuhan, situasi, serta pengetahuannya. Dengan demikian pekerja sosial tidak dapat menggeneralisasikan persoalan yang sama dengan klien yang berbeda, melainkan dengan memandang klien “yang saat ini dan di sini” (*here and now*).
4. **Self Determination**, yaitu memberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan kepada klien. Penting bagi klien untuk memilih keputusan yang tepat menurut dirinya sendiri.
5. **Genuine/congruence**, berarti pekerja sosial berperan sebagai seorang manusia yang apa adanya, alami, tidak memakai topeng, pribadi yang asli dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Hal ini dimaksudkan agar konsentrasi dan perhatian seorang pekerja sosial tidak teralihkan ke dalam urusan diri sendiri.
6. **Mengontrol keterlibatan emosional**, pekerja sosial mampu bersikap objektif dan netral. Pekerja sosial harus dapat membedakan mana tanggung jawab klien dan mana tanggung jawab dirinya. Mengontrol respon emosional dapat dilakukan dengan cara menghindari sikap simpati, dan mengedepankan sikap empati.

7. **Kerahasiaan (*confidentiality*)**, pekerja sosial harus bisa menjaga kerahasiaan informasi mengenai diri klien. Dengan begitu, klien akan merasa nyaman menceritakan mengenai masalah yang sedang dihadapinya. Kerahasiaan merupakan bagian dari etika dalam praktik pekerjaan sosial.

3) Kerangka Keterampilan (*Body of skill*)

Pada penerapan suatu teori atau *knowledge* membutuhkan *skill*, oleh karena itu, setiap profesi menuntut *skill*. *Skills* merupakan komponen keterampilan yang penting dalam kerangka referensi pekerjaan sosial, karena keterampilan merupakan alat yang digunakan untuk memadukan kerangka pengetahuan dan kerangka nilai.

Naomi I. Brill menyatakan bahwa keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki profesi pekerjaan sosial meliputi:

1. *Differential diagnosis*, yaitu keterampilan pekerja sosial untuk memahami keunikan klien, masalah, dan situasi sosial. Sehingga pekerja sosial diharapkan mampu mendiagnosa masalah manusia yang berbeda dengan yang lain.
2. *Timing*, dalam hal ini pekerja sosial diharapkan mampu menggunakan waktu secara tepat dan memiliki keterampilan untuk merencanakan.
3. *Partialization*, merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh pekerja sosial untuk mengklasifikasikan, mengelompokkan, menganalisis, dan menginterpretasikan masalah tentang kebutuhan klien.

4. *Focus*, pekerja sosial harus mampu memfokuskan salah satu masalah sosial yang mempunyai banyak dimensi sebagai *point of entry*. Keterampilan tersebut berkaitan dengan kemampuan pekerja sosial ketika bekerja sama dengan klien untuk pemusatan kegiatannya terhadap aspek-aspek yang dapat berpengaruh terhadap permasalahan dan situasi klien.
5. *Establishing partnership*, merupakan kemampuan pekerja sosial dalam mengajak klien atau sistem sosial yang terkait dalam usaha pemecahan masalah. Pihak-pihak yang dapat terlibat adalah:
 - a. Sistem klien, yaitu orang atau sekelompok orang yang sedang mengalami masalah dan membutuhkan pertolongan
 - b. Sistem sasaran, orang atau *significant others* yang harus diubah terlebih dahulu agar pada saat pemberian bantuan kepada sistem klien dapat tercapai sesuai tujuan
 - c. Sistem kegiatan, ialah orang atau lembaga yang dapat bekerjasama oleh pelaksana perubahan
 - d. Sistem pelaksanaan perubahan, yaitu orang-orang yang berada di suatu lembaga yang melaksanakan kegiatan pertolongan.

2.2.2.3. Karakteristik Pekerjaan Sosial

1. Karakteristik Umum

Pekerjaan sosial memiliki karakteristik umum (*general characteristic*) sebagaimana yang dirumuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai hasil dari survei internasional. Karakteristik tersebut sebagai berikut:

- a. Pekerjaan sosial merupakan suatu aktivitas pertolongan kepada seseorang, keluarga, dan kelompok agar dapat mengatasi rintangan untuk mencapai suatu tingkatan hidup yang paling minimum di dalam kesejahteraan sosial dan ekonomi.
- b. Pekerjaan sosial merupakan suatu aktivitas sosial yang pelaksanaannya tidak untuk keuntungan perseorangan, tetapi untuk kepentingan anggota masyarakat yang dianggap membutuhkan pertolongan.
- c. Pekerjaan sosial merupakan suatu aktivitas perhubungan mengusahakan menghubungkan sumber-sumber yang ada di dalam masyarakat agar seseorang, keluarga, dan kelompok yang menderita dapat mengatasi kebutuhannya.
(Sumantri Praptokusumo, 2006)

2. Menurut Skidmore

Menurut Skidmore yang dikutip oleh Iskandar Husain (2003), menyatakan ciri-ciri atau karakteristik pekerjaan sosial sebagai berikut:

- a. Fokus pekerjaan sosial yaitu pada keseluruhan orang, termasuk pada dirinya sendiri, faktor lingkungan, dan tingkah laku manusia. Hal tersebut dilakukan oleh pekerja sosial sebagai orang dalam situasi sosial.
- b. Pekerjaan sosial pada pekerjaan keluarga menggunakan pendekatan yang terpusat pada keluarga (*family centered*), berdasar pada keluarga (*family based*),

atau keluarga secara keseluruhan (*total family*) sebagai suatu faktor dalam mempengaruhi tingkah laku.

- c. Pekerjaan sosial menggunakan sumber kemasyarakatan dalam membantu seseorang. Apabila sumber kemasyarakatan tidak ada maka, pekerjaan sosial berupaya untuk menciptakan sumber-sumber tersebut.
- d. Kegiatan supervisi digunakan secara luas (ekstensif) yang bertujuan untuk membimbing dan mengarahkan tugas pekerja sosial yang sudah berpengalaman guna mengembangkan pengalaman tersebut.
- e. Pekerjaan sosial memiliki program pada bidang pendidikan yang bersifat unik yang mencakup pelajaran di kelas dan praktik di lapangan.
- f. Pada umumnya pekerjaan sosial menggunakan tiga metode dasar pada proses pertolongan, yaitu *social case work*, *social group work*, dan *community organization*.
- g. Proses pekerjaan sosial didasarkan pada hubungan antara pekerja sosial dan klien (*a client worker relationship*).
- h. Pada dasarnya tujuan dari pekerjaan sosial yaitu membantu klien untuk menolong dirinya sendiri (*to help people to help themselves*).
- i. Istilah sosial dalam pekerjaan sosial dititikberatkan pada interaksi sosial serta hasil dari fungsi atau ketidakberfungsian sosial klien.
- j. Pekerjaan sosial memiliki tujuan dalam konsep psikiatrik dan menitikberatkan pada pemahaman orang akan masalah yang terjadi.

- k. Pekerja sosial adalah seseorang yang bekerja dalam suatu lembaga pelayanan sosial.
- l. Pekerja sosial mempergunakan pendekatan team agar dapat meningkatkan efektivitasnya, serta melakukan koordinasi atas berbagai pelayanan dan kegiatan yang dilakukannya.

2.2.2.4. Asas Pekerja Sosial

Asas dasar umum (*general principles*) pekerja sosial berkembang atas dasar nilai-nilai dan keyakinan yang berkembang di masyarakat (Walter A. Friedlander 2002). Asas tersebut didasarkan sikap saling menghormati dan mengutamakan hak-hak semua orang. Menurut Walter A. Friedlander (2002) apabila dikaji lebih lanjut, maka asas dasar umum pekerja sosial sebagai berikut:

1. Pengakuan bahwa semua manusia memiliki martabat, harga diri, serta kehormatan yang harus dihargai dan dijunjung tinggi.
2. Pengakuan bahwa semua manusia tidak sempurna. Maksudnya, semua manusia memiliki keterbatasan dan ia berhak untuk menentukan sendiri kekurangan tersebut dan cara untuk mengatasinya.
3. Pengakuan bahwa semua manusia mempunyai hak dan kesempatan yang sama, tetapi kesempatan-kesempatan itu dibatasi oleh kemampuan-kemampuan yang dimiliki masing-masing individu.
4. Pengakuan bahwa penghormatan pada diri sendiri (*self respect*), harga diri, penentuan nasib sendiri, serta kesempatan yang adil, berkaitan erat dengan

pertanggungjawaban sosial terhadap diri sendiri, keluarga, dan lingkungannya.

Asas dasar umum (*general principles*) diatas menjadi dasar dalam pelaksanaan ketiga metode utama pekerja sosial, yaitu bimbingan sosial perorangan (*social case work*), bimbingan sosial kelompok (*social group work*), dan bimbingan sosial masyarakat (*community organization*).

2.2.2.5. Tujuan Pekerja Sosial

Di dalam bukunya yang berjudul *Social Work Practice, Model and Method*, Allen Pincus dan Anne Minahan (2003) merumuskan bahwa ada empat tujuan pekerja sosial, yaitu:

1. Memecahkan masalah-masalah yang sedang dihadapi seseorang serta meningkatkan kemampuan orang untuk menghadapi tugas-tugas kehidupan.
2. Mengaitkan sistem sumber dengan orang dan kesempatan yang dibutuhkan.
3. Meningkatkan kemampuan pelaksanaan sistem secara efektif dan berperikemanusiaan.
4. Memberikan sumbangan untuk perubahan, perkembangan, dan perbaikan kebijakan dan perundang-undangan sosial.

Maka keempat tujuan tersebut sangat berkaitan erat dengan hakikat pekerja sosial yang merupakan suatu profesi yang mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki dan mengembangkan interaksi antar orang sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas di kehidupannya; dapat mengatasi permasalahan atau

kesulitan yang sedang dihadapi; serta dapat membantu seseorang untuk mencapai kesejahteraannya, baik individu maupun kolektivitas.

2.2.2.6. Fungsi dan Tugas Pekerja Sosial

Menurut Joewono (2009) untuk mencapai tujuan dari pekerja sosial, maka pekerja sosial juga melaksanakan suatu fungsi dan akan berhasil apabila pekerja sosial yang pada umumnya dikerjakan oleh suatu badan sosial atau lembaga memberikan pelayanan sosial dengan melaksanakan tugas-tugas pekerja sosial sebagai berikut:

1. Membantu orang dalam memecahkan masalah mereka serta membantu meningkatkan dan menggunakan kemampuannya untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan secara lebih efektif

- a. Pekerja sosial mengidentifikasi dan mengadakan suatu hubungan dengan orang yang membutuhkan bantuan dalam menyelesaikan tugas kehidupannya.
- b. Pekerja sosial dapat memberikan dukungan dan dorongan kepada orang yang membutuhkan pertolongan
- c. Pekerja sosial dapat memberikan kesempatan kepada orang untuk menyatakan permasalahan yang sedang dialaminya.
- d. Pekerja sosial dapat membantu orang untuk menilai beberapa alternatif dalam pemecahan masalah serta memberikan penjelasan mengenai pilihan alternatif tersebut dan membantunya untuk mengambil keputusan.

- e. Pekerja sosial dapat mengonfrontasikan orang dengan situasi yang realitas dengan cara memberikan kekurangan yang dapat mengganggu keseimbangannya dan memberikan motivasi kepada mereka agar dapat melaksanakan suatu perubahan.
- f. Pekerja sosial dapat mengajarkan kepada mereka berbagai keterampilan guna membantu individu dalam merealisasikan aspirasi mereka.

2. Mengaitkan sistem sumber dengan orang

- a. Pekerja sosial mengidentifikasi orang yang sedang membutuhkan sumber-sumber tertentu dan mempunyai hak untuk memperoleh sumber tersebut, tetapi orang tersebut tidak memperoleh suatu sumber.
- b. Pekerja sosial memberikan informasi mengenai sumber-sumber yang tersedia, hak-hak orang terhadap sumber, dan prosedur yang dibutuhkan untuk memperolehnya.
- c. Pekerja sosial dapat membantu orang untuk mengetahui masalah praktis dengan memanfaatkan sistem sumber di atas.
- d. Pekerja sosial dapat bertindak sebagai wakil dari orang yang sedang mengalami masalah untuk memanfaatkan sumber-sumber tertentu.
- e. Pekerja sosial dapat memberikan informasi dan bertindak sebagai wakil dari orang atau dari suatu organisasi tertentu dan pekerja sosial berusaha untuk mempengaruhi suatu lembaga atau badan sosial agar meninjau kembali

kebijakannya dalam memberikan suatu pelayanan kepada kelompok tertentu.

- f. Pekerja sosial dapat membantu orang agar bermanfaat sebagai suatu sumber bagi orang lain di tempat, mereka saling berkaitan melalui sistem baru (Joewono, 2009).

3. Menciptakan hubungan baru antar orang dan sistem sumber masyarakat

- a. Pekerja sosial dapat memberikan informasi kepada sistem sumber masyarakat dengan tujuan untuk menjelaskan suatu permasalahan yang diakibatkan oleh prosedur pemberian pelayanan kepada konsumen.
- b. Pekerja sosial dapat bertindak sebagai konsultan bagi sistem masyarakat dan memberikan rekomendasi tentang metode-metode pemberian pelayanan.
- c. Pekerja sosial dapat berusaha melakukan kegiatan dan perencanaan yang terkoordinasi di antara orang-orang dari berbagai sistem sumber masyarakat.
- d. Pekerja sosial dapat mengorganisasikan penerima pelayanan yang ada di masyarakat sehingga menjadi suatu organisasi tersendiri atau mendorong organisasi agar berbuat serupa.
- e. Pekerja sosial dapat menjadi penengah ketika memecahkan masalah atau suatu konflik yang terjadi antara sistem sumber masyarakat dan sistem sumber informal ataupun sumber formal.

4. Menciptakan relasi dan mempermudah interaksi antar orang di lingkungan sistem sumber

- a. Pekerja sosial memberikan informasi dari satu bagian ke bagian yang lain dari suatu sistem.
- b. Pekerja sosial selain menjadi penengah netral, pekerja sosial juga dapat mewakili atau memihak kepentingan dari salah satu sistem yang kurang memiliki kekuatan dalam membuat keputusan ataupun mendapatkan kepuasan dalam menjalankan perannya di sistem itu.
- c. Pekerja sosial dapat membantu mengorganisasi bagian dari suatu sistem dan bekerja untuk mengubah dari bagian sistem-sistem tersebut.
- d. Pekerja sosial dapat bertindak sebagai konsultan bagi anggota sistem, pekerja sosial menjelaskan permasalahan yang terjadi di dalam sistem itu, serta menyarankan suatu perubahan pada prosedur operasional atau peranan yang harus dilakukan oleh anggota tersebut.
- e. Pekerja sosial dapat mengajarkan keterampilan-keterampilan kepada anggota suatu sistem dengan tujuan agar mereka mampu melaksanakan perannya serta melaksanakan peranan baru di dalam sistem tersebut secara memuaskan.
- f. Pekerja sosial dapat mengundang anggota baru ke dalam sistem atau mendorong anggota yang sudah ada sehingga sistem mampu meningkatkan fungsinya.

- g. Pekerja sosial dapat mengikutsertakan anggota sistem dengan cara mendiskusikan kesulitan yang dialami atau menciptakan umpan balik (*feedback*) di dalam sistem tersebut.

5. Memberikan sumbangan untuk perubahan, perkembangan, serta perbaikan kebijakan dan perundang-undangan

- a. Pekerja sosial menganalisis suatu informasi mengenai permasalahan serta kondisi yang harus diubah melalui perubahan kebijakan sosial (*social policy*).
- b. Pekerja sosial dapat mendorong badan-badan sosial di tempat ia bekerja sama agar mereka dapat menentukan sikap terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat.
- c. Pekerja sosial dapat membentuk suatu sistem baru guna melaksanakan perubahan pada kebijakan.
- d. Pekerja sosial dapat memberikan suatu informasi kepada pembuat kebijakan sosial ataupun bertindak sebagai konsultan sebagai perubahan kebijakan sosial.
- e. Pekerja sosial dapat mendorong pihak lain untuk menjadi wakil yang secara langsung berhubungan dengan pembuat kebijakan guna mengadakan perubahan kebijakan sosial.

- f. Pekerja sosial dapat membantu dalam menyusun pelayanan dan program, menciptakan pelayanan, serta menyusun konsep perundang-undangan dan kebijakan yang dibutuhkan.
- g. Pekerja sosial dapat menguji perundang-undangan ataupun kebijakan-kebijakan yang berlaku dalam bekerja sama dengan orang lain dengan cara mengajukan suatu kasus tertentu ke pengadilan.

6. Meratakan sumber-sumber material

- a. Pekerja sosial dapat menentukan kebutuhan dan ketetapan sumber-sumber, dan menentukan orang-orang yang berhak untuk memanfaatkan sumber-sumber itu.
- b. Pekerja sosial dapat membentuk suatu sumber informal yang baru untuk orang-orang tertentu.
- c. Untuk memanfaatkan sumber, pekerja sosial dapat menentukan tempat sumber yang berada atau persyaratan.
- d. Pekerja sosial dapat memberikan suatu pengetahuan dan keterampilan kepada orang yang akan bertindak sebagai sistem sumber tersebut.
- e. Pekerja sosial mempersiapkan seseorang untuk memanfaatkan sumber serta membantu mereka untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif.
- f. Pekerja sosial dapat mengawasi dan bertindak sebagai supervisi dalam penggunaan sumber tersebut.

7. Bertindak sebagai pelaksanaan kontrol sosial

- a. Pekerja sosial dapat mengadakan supervisi terhadap orang yang berperilaku menyimpang (*deviant behavior*).
- b. Pekerja sosial dapat menyelidiki laporan-laporan mengenai praktik penyiksaan dan penelantaran terhadap orang yang seharusnya mendapatkan perlindungan.
- c. Pekerja sosial dapat memberikan lisensi kepada sumber yang telah memberikan fasilitas untuk menjamin pelayanan yang memadai bagi orang yang membutuhkan pertolongan.

2.2.2.7. Peran Pekerja Sosial

Secara garis besar, peran pekerja sosial memiliki empat peran sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan kapasitas orang dalam mengatasi suatu masalah yang sedang dihadapinya.** Dalam hal ini, peran pekerja sosial yaitu mengidentifikasi apa saja hambatan-hambatan yang dialami oleh klien dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Selain itu, pekerja sosial juga menggali kekuatan-kekuatan yang ada pada diri klien dengan tujuan yaitu untuk mengembangkan solusi dan rencana pertolongan.
- 2. Menghubungkan dan menggali sumber-sumber yang tersedia di sekitar klien.** Adapun tugas-tugas pekerja sosial yang terkait dalam hal ini antara lain: (a). Membantu klien dalam menjangkau sumber-sumber yang

diperlukannya; (b). Mengembangkan program pelayanan sosial yang dapat memberikan manfaat bagi klien; (c). Meningkatkan komunikasi antara para petugas kemanusiaan; dan (d). Mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pelayanan sosial bagi klien.

3. Meningkatkan jaringan pelayanan sosial. Tujuan utama dalam peran ini yaitu untuk menjamin bahwa sistem kesejahteraan sosial berjalan secara manusiawi, sensitif terhadap kebutuhan-kebutuhan warga setempat serta bekerja dengan baik dalam memberikan pelayanan sosial terhadap masyarakat.

4. Mengoptimalkan keadilan sosial melalui pengembangan kebijakan sosial. Dalam peran ini, pekerja sosial mengidentifikasi isu-isu sosial serta bagaimana implikasinya terhadap kehidupan masyarakat. Selain itu, pekerja sosial juga dapat menafsirkan kebijakan-kebijakan publik ke dalam program serta pelayanan sosial yang dibutuhkan oleh klien.

Merujuk pada Parsons, Jorgensen, dan Hernandez (1994) dalam Edi Suharto (2005 : 98–103), ada lima peran pekerja sosial dalam pembimbingan sosial.

1. Fasilitator (*enabler*)

Dalam literatur pekerjaan sosial, peranan “fasilitator” sering disebut juga sebagai “pemungkin” (*enabler*). Pemungkin atau fasilitator ialah sebagai tanggung jawab untuk membantu klien menjadi mampu dalam menangani tekanan situasional atau transisional (Barker, 1978). Parsons, Jorgensen dan

Hernandez (1994 : 190—203) mengeluarkan kerangka acuan mengenai tugas-tugas yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial, yaitu:

- a) Mendefinisikan keanggotaan atau siapa pun yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan;
- b) Mendefinisikan tujuan keterlibatan;
- c) Mendorong komunikasi serta relasi, dan menghargai pengalaman serta perbedaan-perbedaan;
- d) Memfasilitasi keterikatan dan kualitas sinergi pada sebuah sistem untuk menemukan kesamaan dan perbedaan;
- e) Memfasilitasi pendidikan dengan tujuan membangun pengetahuan dan keterampilan;
- f) Memberikan model atau sebuah contoh dan memfasilitasi pemecahan masalah bersama dengan tujuan mendorong kegiatan kolektif;
- g) Mengidentifikasi masalah-masalah yang akan dipecahkan;
- h) Memfasilitasi penetapan tujuan ;
- i) Merancang sebuah solusi-solusi alternatif;
- j) Mendorong pelaksanaan tugas;
- k) Memelihara relasi sistem;
- l) Memecahkan suatu konflik yang sedang terjadi.

2. *Broker*

Peran pekerja sosial sebagai *broker* yaitu mengenai kualitas pelayanan sosial yang ada di sekitar lingkungannya menjadi sangat penting dalam

untuk memenuhi keinginan kliennya dalam memperoleh suatu keuntungan yang maksimal. Peranan sebagai *broker* dapat mencakup menghubungkan klien dengan barang-barang dan pelayanan serta mengontrol kualitas barang dan pelayanan tersebut. Dalam proses pendampingan sosial, ada tiga prinsip utama dalam melakukan peranan sebagai broker, yaitu:

- a) Mampu mengidentifikasi dan menjadikan sumber-sumber kemasyarakatan yang tepat;
- b) Mampu menghubungkan klien dengan sumber secara konsisten;
- c) Mampu mengevaluasi efektivitas sumber yang kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan klien.

3. Mediator

Dalam paradigma generalis peran mediator sangat penting. Peran mediator dibutuhkan terutama ketika terdapat perbedaan yang mencolok serta mengarah pada konflik antara berbagai pihak. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam melakukan sebagai peran mediator seperti perilaku, negosiasi, pendamai pihak ketiga, dan berbagai macam resolusi konflik. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mediasi pada kenyataannya diarahkan untuk mencapai *win-win solution*. Menurut Compton dan Galaway (1989 : 511) ada beberapa teknik dan keterampilan yang dapat digunakan ketika melakukan peran mediator, seperti:

- a) Mencari persamaan nilai dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik;

- b) Membantu setiap pihak agar mengakui legitimasi pada kepentingan pihak lain;
- c) Membantu pihak-pihak yang berseteru dalam mengidentifikasi kepentingan bersama;
- d) Hindari situasi yang dapat mengarah pada munculnya kondisi menang atau kalah;
- e) Berupaya untuk melokalisir ke dalam isu, waktu dan tempat yang spesifik;
- f) Membagi konflik ke dalam beberapa isu;
- g) Membantu pihak-pihak yang berseteru untuk mengakui bahwa mereka lebih memiliki manfaat apabila melanjutkan sebuah hubungan daripada terlibat dalam konflik;
- h) Memfasilitasi komunikasi dengan cara mendukung mereka agar mau berbicara satu sama lain;
- i) Menggunakan prosedur-prosedur persuasi.

4. Pembela

Peran pembelaan atau advokasi ialah salah satu praktek pekerjaan sosial yang berhubungan dengan kegiatan politik. Menurut DuBois dan Miley (1992); Parsons, Jorgensen dan Hernandez (1994) dalam Edi Suharto (2005 : 102) peran pembela dapat dibagi dua, yaitu advokasi kasus (*case advocacy*) dan advokasi kausal (*cause advocacy*). Rothblatt (1978) memberikan beberapa model yang dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan peran pembela dalam pendampingan sosial seperti:

- a) Keterbukaan bertujuan untuk membiarkan berbagai pandangan agar didengar;
- b) Perwakilan luas yaitu bertujuan untuk mewakili semua pelaku yang memiliki kepentingan dalam pembuatan suatu keputusan;
- c) Keadilan yaitu bertujuan untuk memperjuangkan sebuah sistem kesetaraan atau kesamaan sehingga posisi-posisi yang berbeda dapat diketahui sebagai bahan perbandingan;
- d) Pengurangan permusuhan yaitu bertujuan untuk mengembangkan sebuah keputusan yang dapat mengurangi permusuhan dan keterasingan;
- e) Informasi yaitu bertujuan untuk menyajikan masing-masing pandangan secara bersama dengan adanya dukungan dokumen dan analisis;
- f) Pendukung yaitu bertujuan untuk mendukung partisipasi secara luas;
- g) Kepekaan yaitu bertujuan untuk mendorong para pembuat keputusan agar benar-benar mendengar, mempertimbangkan, dan peka terhadap minat-minat dan posisi-posisi orang lain.

5. Pelindung

Tanggung jawab pekerja sosial terhadap masyarakat didukung oleh hukum untuk menjadi pelindung (*protector*) terhadap orang-orang yang lemah dan rentan. Peranan sebagai pelindung dapat mencakup penerapan berbagai kemampuan yang menyangkut dalam: (a) kekuasaan; (b) pengaruh; (c)

otoritas; dan (d) pengawasan sosial. Adapun tugas-tugas peran pelindung dapat meliputi:

- a) Menentukan siapa klien pekerja sosial yang paling utama;
- b) Menjamin bahwa tindakan yang dilakukan sesuai dengan proses perlindungan;
- c) Berkomunikasi dengan semua pihak yang terpengaruh oleh tindakan sesuai dengan tanggung jawab etis, rasional, dan legal pada praktek pekerjaan sosial.

2.2.2.8. Nilai-nilai Dasar Pekerja Sosial

Skidmore dan Thackeray mengemukakan bahwa pekerjaan sosial merupakan suatu profesi pemberian bantuan, hal tersebut muncul dengan didasarkan oleh tiga anggapan dasar, bahwa:

1. Manusia adalah penting.
2. Masalah-masalah pribadi, keluarga, serta sosial yang dialami oleh manusia timbul diakibatkan dari adanya interaksi dengan orang lain.
3. Sesuatu dapat dilakukan guna mengatasi masalah-masalah yang terjadi.

Membahas mengenai nilai, maka nilai dasar pekerjaan sosial berdasarkan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat demokratis, yang seperti dikemukakan oleh Helen Northen, mengandung makna bahwa:

1. Setiap orang bebas untuk mengungkapkan dirinya sendiri.
2. Setiap orang bebas dalam menjaga kerahasiaan dirinya.

3. Setiap orang bebas untuk berpartisipasi dalam memilih keputusan yang menyangkut pada kepentingan pribadinya.
4. Setiap orang berkewajiban untuk mengarahkan kehidupan pribadinya dengan bertanggung jawab agar dapat bertindak secara konstruktif dalam kehidupan bermasyarakat.
5. Setiap individu dan kelompok memiliki tanggung jawab sosial untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. (Helen Northen, *Social Work with Group*, Columbia University Press, 1971)

Berdasarkan nilai dasar tersebut, maka dalam praktiknya seorang pekerja sosial tidak terlepas dari prinsip-prinsip praktik profesi pekerjaan sosial. Karena, prinsip-prinsip praktik pekerja sosial dan etika praktik adalah suatu landasan bagi seorang pekerja sosial dalam melakukan hubungan pertolongan dengan klien.

2.2.3. Konsep Pelayanan Sosial

Program pelayanan sosial merupakan salah satu bentuk dari kebijakan sosial. Pelayanan sosial yaitu suatu tindakan atau aksi guna mengatasi masalah sosial. Pelayanan sosial merupakan suatu wujud dari praktik pekerjaan sosial yang menjadi wadah dalam badan pelayanan sosial (*social service agencies*). Tidak hanya itu, pelayanan sosial sebagai sebuah aktivitas yang terorganisir tidak dapat dipisahkan dengan pekerja sosial sebagai suatu profesi kemanusiaan yang memiliki tugas utamanya yaitu memberikan atau mendistribusikan pelayanan sosial.

2.2.3.1. Pengertian Pelayanan Sosial

Pengertian pelayanan sosial menurut Fahrudin (2012:50) yang dikutip dari Sainsbury (1977), mengemukakan definisi pelayanan sosial secara luas , yaitu:

Pelayanan-pelayanan sosial yaitu suatu pelayanan yang dipergunakan untuk semua (*communal services*) yang berkepentingan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial serta mengurangi masalah-masalah sosial tertentu—khususnya, kebutuhan-kebutuhan atau masalah-masalah yang membutuhkan penerimaan publik secara umum atas tanggung jawab sosial dan tergantung dari pengorganisasian hubungan-hubungan sosial dalam melakukan pemecahan masalah.

Dari definisi diatas, menurut Sainsbury pelayanan-pelayanan sosial secara luas, meliputi kesehatan, pendidikan, pemeliharaan penghasilan, perumahan serta pelayanan personal. Dikatakan oleh Spicker bahwasannya penerapan istilah pelayanan sosial tidak konsisten dan setiap negara memiliki definisi yang berbeda-beda. Sedangkan menurut Johnson (1986), menjelaskan pengertian pelayanan sosial sebagai program-program serta tindakan-tindakan yang mempekerjakan pekerja sosial atau tenaga profesional yang berhubungan dan diarahkan pada tujuan-tujuan kesejahteraan sosial.

Pada definisi tersebut tidak begitu jelas karena definisi tersebut memasukkan kegiatan-kegiatan pelayanan sosial yang dilakukan oleh seorang tenaga profesional lain. Pada kegiatan-kegiatan tersebut diarahkan pada tujuan-tujuan kesejahteraan sosial, oleh karena itu kegiatan-kegiatan itu dikatakan sebagai pelayanan sosial.

Pengertian pelayanan sosial menurut Fahrudin (2012:51) yang dikutip dari Romanyshyn (1971) mengemukakan definisi pelayanan sosial sebagai berikut:

Pelayanan sosial sebagai suatu usaha-usaha guna mengembalikan, mempertahankan, serta meningkatkan kemampuan dari individu-individu

dan keluarga-keluarga dengan cara (1) sumber-sumber sosial pendukung, dan (2) proses-proses yang meningkatkan kemampuan individu-individu serta keluarga-keluarga guna mengatasi stress dan tuntutan-tuntutan kehidupan sosial yang normal.

Menurut Wickenden (1976) yang diambil dari buku Fahrudin (2012:51) berjudul Pengantar Kesejahteraan Sosial, persepsi atas pengertian pelayanan sosial berdasarkan hubungan antara tiga konsep, ialah “kesejahteraan sosial” menggambarkan sebagai suatu bidang fungsional yang luas; “pelayanan sosial” menggambarkan sebagai unsur pelayanan personal dari fungsi dalam bidang kesejahteraan sosial; sedangkan “pekerjaan sosial” menggambarkan suatu profesi yang mengarahkan atau menjalankan pelayanan-pelayanan tersebut. Maka secara garis besar, pelayanan sosial yaitu suatu kegiatan-kegiatan yang dijalankan atau diarahkan oleh pekerja sosial dalam melaksanakan suatu fungsi-fungsi dalam bidang kesejahteraan sosial.

Dalam pemberian pelayanan sosial diberikan atas dasar kebutuhan, maka dari itu apabila orang tidak mampu dalam membayar, tetap akan diberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya pelayanan-pelayanan dalam bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, jaminan sosial, pelatihan kerja, serta pelayanan sosial personal yang disediakan secara minimal guna memajukan kehidupan masyarakat serta keberfungsian orang-orang. Profesi pekerjaan sosial dengan pelayanan sosial personal akan membantu orang-orang yang sedang mengalami masalah serta orang-orang miskin, serta dapat menjangkau pelayanan-pelayanan dan/atau suatu lembaga tertentu yang dibutuhkan.

Daftar pelayanan sosial di negara yang sedang berkembang dapat mencakup pelayanan-pelayanan sosial personal yang tergolong sebagai “pelayanan kesejahteraan sosial (*social welfare services*)” pelayanan-pelayanan tersebut memfokuskan pada bantuan kepada individu-individu serta keluarga yang sedang mengalami masalah dalam penyesuaian diri dan keberfungsian atau kemiskinan guna diperbaiki.

2.2.3.2. Jenis dan Cakupan Pelayanan Sosial

Di negara-negara industri yang maju, seperti Inggris, AS, Australia, dan Selandia Baru, secara tradisi kebijakan sosial dapat mencakup ketentuan atau regulasi pemerintah tentang lima bidang pelayanan sosial, seperti jaminan sosial, pelayanan perumahan, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan atau perawatan sosial personal (Suharto, 2007a: 160–167). Dalam pembahasan kebijakan publik, jenis-jenis dari pelayanan sosial yang dilaksanakan oleh negara lebih memfokuskan untuk kelompok-kelompok yang lemah.

1. Jaminan Sosial

Jaminan sosial (*social security*) merupakan suatu sistem atau skema dalam pemberian tunjangan yang menyangkut dalam pemeliharaan penghasilan (*income maintenance*). Di negara lain, jaminan sosial dapat mencakup berupa bantuan sosial (*social assistance*), yaitu berupa bantuan uang atau barang yang biasanya diberikan kepada kelompok yang lemah tanpa memikirkan kontribusinya.

Sebagai pelayanan sosial publik, yaitu sebagai elemen negara yang dirancang guna menjamin bahwa setiap orang memiliki pendapatan minimum yang cukup agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

2. Perumahan

Rumah merupakan suatu kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh manusia. Suatu negara mempunyai kewajiban asasi dalam menyediakan perumahan bagi warga negaranya, khususnya bagi mereka yang termasuk keluarga kurang mampu. Pelayanan perumahan yang diadakan oleh pemerintah merupakan perumahan publik atau perumahan sosial. Selain adanya Rusunawa atau RSS, perumahan sosial juga dapat mencakup sebagai berikut:

- a. Penyediaan rumah sewa dewan kota yang sangat relatif murah. Penyebutan perumahan tersebut di Inggris, Australia, dan Selandia Baru yaitu disebut *city council housing*.
- b. Memberikan subsidi terhadap asosiasi-asosiasi penyedia perumahan pada kelompok-kelompok khusus. Seperti, perumahan bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.
- c. Memberikan kemudahan akses kredit dan pemberian subsidi bagi pembelian rumah.
- d. Bantuan finansial bagi lembaga-lembaga sukarela yang menyediakan akomodasi dan dukungan terhadap para tuna-wisma.

- e. Pemberian izin serta pengawasan terhadap akomodasi ataupun rumah-rumah sewa yang diselenggarakan masyarakat sehingga tidak melanggar standar dan ketentuan yang berlaku.

3. Kesehatan

Pelayanan kesehatan dapat dilihat sebagai suatu aspek yang penting dalam kebijakan sosial, karena kesehatan merupakan suatu faktor penentu bagi kesejahteraan sosial. Sejahtera bukan hanya memiliki pendapatan atau rumah yang memadai. Melainkan pula orang yang sehat, baik jasmani maupun rohani. Rancangan pelayanan kesehatan publik berkaitan erat dengan sistem jaminan sosial, terutama asuransi sosial, karena pada sebagian pelayanannya menyangkut atau berbentuk asuransi kesehatan. Peran pemerintah dalam pelayanan kesehatan publik dapat mencakup kepemilikan rumah sakit dan pusat-pusat kesehatan. Termasuk pada penetapan kebijakan terhadap penyelenggara dan penyedia perawatan kesehatan yang dilakukan oleh pihak swasta.

Selain itu, keterlibatan pekerja sosial dalam bidang kesehatan terutama dilandasi oleh perubahan paradigma mengenai sakit dan hidup sehat yang tidak hanya semata-mata menyangkut mengenai aspek fisik manusia saja, seperti:

- a. Masalah-masalah psikososial dan kultural dapat menjadi penyebab atau akibat dari sakit atau sehatnya seseorang. Gaya hidup yang tidak sehat, merokok, serta kebiasaan membuang sampah sembarangan juga berkaitan erat dengan isu-isu kesehatan. Selain itu, stress, depresi, kejenuhan kerja (*burnout*) dapat

menimbulkan penyakit. Sebaliknya, penyakit yang diderita oleh seseorang juga dapat menimbulkan stress serta depresi.

- b. Isu-isu kesehatan merupakan suatu bagian dari, atau ditentukan oleh, berbagai faktor psikis, sosial, dan ekonomi yang memerlukan penanganan komprehensif bukan saja dari pekerja medis “konvensional” seperti dokter dan perawat, melainkan pula dari profesi lain seperti psikolog, psikiater, dan pekerja sosial.
- c. Adanya masalah sosial, seperti ketergantungan terhadap narkoba, perceraian, pelacuran, pekerja anak, anak jalanan, serta perlakuan salah terhadap anak (*child abuse, sexual abuse*) yang sangat berkaitan dan bahkan dapat menimbulkan masalah-masalah pada kesehatan.

4. Pendidikan

Suatu negara mempunyai tiga kewajiban penting dalam bidang pendidikan. Pertama, yaitu sebagai penyedia utama lembaga-lembaga pendidikan, seperti sekolah, akademi dan universitas. Kedua, yaitu sebagai pengatur penyelenggara pendidikan, baik pendidikan negeri, swasta maupun lembaga-lembaga yang non-formal. Ketiga, yaitu sebagai fasilitator dalam penyediaan infrastruktur pendidikan, termasuk di dalamnya penyedia pada skema-skema beasiswa dan tunjangan-tunjangan pendidikan bagi siswa-siswi yang berprestasi dan atau tidak mampu.

Pendidikan yaitu suatu perangkat yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan warga melalui penguasaan pengetahuan, informasi, serta teknologi yang bertujuan sebagai prasyarat masyarakat modern. Dalam konteks kebijakan sosial, pelayanan pendidikan bukan hanya ditujukan untuk menyediakan dan

menyiapkan angkatan kerja saja, tetapi untuk mencapai tujuan-tujuan sosial dalam arti luas, yaitu membebaskan masyarakat dari kebodohan serta keterbelakangan. Pelayanan pendidikan memiliki beberapa keterlibatan dan keterkaitan dengan peranan pekerja sosial, yaitu:

- a. Para pekerja sosial atau para pekerja pendidikan spesialis (contohnya pendidik atau pelatih bidang-bidang vokasional khusus di sekolah-sekolah luar biasa) terlibat dalam menangani masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan pendidikan.
- b. Pekerja sosial biasanya terlibat dalam *assesment* multidisiplin mengenai kebutuhan-kebutuhan siswa sesuai dengan isu-isu yang berkembang di sekolah.
- c. Anak-anak ataupun remaja yang mengalami hambatan belajar memiliki kebutuhan-kebutuhan pendidikan. Yang kompleks serta berbeda dengan anak atau remaja yang lain. Mereka memerlukan keterlibatan pekerja sosial.
- d. Sekolah seharusnya memiliki hubungan yang erat antara keluarga dan komunitas. Lingkungan yang kondusif baik di sekolah, rumah, maupun di masyarakat merupakan suatu penentu dari keberhasilan pendidikan anak dan remaja saat ini, serta adanya suatu interaksi yang positif diantara ketiga domain tersebut.

5. Pelayanan Sosial Personal (*Personal Social Service*)

Pada pelayanan ini meliputi berbagai bentuk perawatan sosial (*social care*) di luar pelayanan kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial. Secara garis besar, pelayanan ini mencakup tiga jenis, yaitu:

1. Perawatan anak (*child care*)

Pelayanan perawatan anak (*child care*) diberikan kepada anak-anak serta keluarganya, terutama kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus, seperti anak yang mengalami cacat fisik dan mental yang tidak dapat menjalankan kehidupannya sehari-hari tanpa pertolongan dari pihak lain. Pelayanan ini juga meliputi pada perlindungan anak (*child protection*) dan pengasuhan anak.

2. Perawatan masyarakat (*community care*)

Perawatan masyarakat (*community care*) yaitu opsi terhadap pelayanan yang diberikan di dalam suatu lembaga (*institution-based care*). Misalnya, salah satu bentuk *community care* (perawatan masyarakat) yang umum diberikan, yaitu pelayanan rehabilitas berbasis masyarakat (*community-based rehabilitation*) dan rehabilitasi keliling (*mobile rehabilitation*).

3. Peradilan kriminal (*criminal justice*)

Para pekerja sosial di negara-negara maju ataupun di negara berkembang termasuk Indonesia, sudah lama terlibat dalam menangani masalah kriminal; tercakup terhadap pelanggar hukum anak-anak. Pekerja sosial biasanya akan memberikan pelayanan konseling atau terapi psikososial kepada narapidana yang masih berada di dalam penjara, ataupun diberikan kepada eks-Napi yang telah kembali ke lingkungan masyarakat. Selain itu, pekerja sosial juga

melakukan *assesment* dan pendampingan sosial. Di Indonesia, pekerja sosial telah banyak bekerja di Bapas (Bapas Pemasyarakatan) dan Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) di bawah Kementerian Hukum dan HAM.

2.2.3.3. Strategi Pelayanan Sosial

Beberapa strategi pelayanan sosial yang dapat dilakukan, seperti:

1. *Child/Individual Based Service*

Merupakan suatu pelayanan yang menempatkan individu sebagai dasar penerima pelayanan; seperti konseling.

2. *Institutional Based Service*

Pada pelayanan ini, individu yang sedang mengalami masalah ditempatkan ke dalam lembaga pelayanan sosial; misalnya dalam hal pendidikan serta pelatihan.

3. *Family Based Service*

Pada pelayanan ini, keluarga sebagai salah satu sasaran dan media utama dalam pemberian pelayanan; dalam hal ini, kegiatan ditujukan pada pembinaan keluarga supaya memiliki kemampuan di bidang ekonomi, psikologis, dan sosial dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapinya.

4. *Community Based Service*

Pada pelayanan ini, masyarakat dijadikan sebagai pusat penanganan yang bertujuan guna meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab masyarakat agar ikut aktif dalam memecahkan masalah. Peran pekerja sosial dalam hal ini, pekerja sosial bersama masyarakat merancang dan melaksanakan program

Community Development, penyuluhan dan bimbingan, maupun melakukan kampanye sosial.

5. *Location Based Service*

Pada strategi pelayanan ini, pelayanan diberikan di lokasi individu yang sedang mengalami masalah.

6. *Half-Way House Service*

Seperti pada pelayanan yang semi panti.

7. *State Based Service*

Pada pelayanan ini bersifat makro, tidak langsung (*macro-indirect services*), pekerja sosial menjalankan situasi dan kondisi yang kondusif bagi terselenggaranya suatu usaha kesejahteraan sosial bagi anak atau individu. Pada perumusan kebijakan kesejahteraan merupakan salah satu bentuk program dalam strategi pelayanan ini.

2.2.4. Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pendidikan

Pendidikan lahir dari adanya kehadiran sebuah komunitas dan masyarakat. Pendidikan dilakukan bertujuan bagi kemajuan, perubahan, dan stabilitas sosial dari masyarakat. Pendidikan dilakukan juga untuk kepentingan suatu masyarakat, baik di tingkat lokal, keluarga, daerah, provinsi, maupun bangsa secara keseluruhan. Masyarakat merupakan peranan yang sangat penting terhadap keberadaan, kelangsungan, serta kemajuan pendidikan.

Salah satu faktor dari keberhasilan pendidikan yang maju, yaitu adanya keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang maksimal. Sebaliknya, apabila ada pendidikan yang kurang maju maka salah satu penyebabnya yaitu masyarakat yang

tidak mendukung. Oleh karena itu, partisipasi serta hubungan dengan masyarakat harus dikelola dengan baik. Dalam hal ini pada penelitian ini yaitu partisipasi bersekolah merupakan salah satu partisipasi masyarakat dalam pendidikan.

2.2.4.1. Pengertian Partisipasi

Pengertian partisipasi secara umum merupakan keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Pengertian tersebut selaras dengan pengertian yang telah dikemukakan oleh beberapa kamus besar sosiologi.

Menurut Bornby (1974) mengartikan partisipasi yaitu sebagai suatu tindakan untuk “mengambil bagian”, yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari suatu kegiatan dengan maksud untuk memperoleh manfaat (Webster, 1976). Sedangkan menurut Theoderson (1969) di dalam kamus sosiologi disebutkan bahwa, partisipasi yaitu keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial guna mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri.

Raharjo (1983) menyatakan bahwa keikutsertaan tersebut, dilakukan sebagai akibat dari adanya interaksi sosial antara individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat yang lainnya. Karakteristik dari proses partisipasi ini yaitu, semakin mantapnya jaringan sosial (*social network*) yang “baru” maka dapat membentuk suatu jaringan sosial guna terwujudnya suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang diinginkan. Karena itu, partisipasi sebagai proses akan menciptakan jaringan sosial baru yang masing-masing berusaha untuk

melaksanakan tahapan-tahapan suatu kegiatan demi tercapainya tujuan akhir yang diinginkan oleh masyarakat atau struktur sosial yang bersangkutan.

Sebagai suatu kegiatan, partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian seperti kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat (Verhangen, 1979). Tumbuhnya suatu interaksi dan komunikasi tersebut, dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki oleh yang bersangkutan mengenai:

1. Adanya kondisi yang tidak memuaskan dan harus diperbaiki;
2. Kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan-kegiatan manusia atau masyarakat itu sendiri;
3. Kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukannya;
4. Adanya kepercayaan diri, bahwa ia dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan.

Menurut Aswasulasikin (2017 : 65) yang dikutip dari Suryosubroto (2002), partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam memberikan gagasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi serta mendukung pencapaian tujuan dan bertanggung jawab atas keikutsertaannya.

Pengertian partisipasi masyarakat juga dikemukakan oleh Dwiningrum (2011), yaitu partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan (implementasi) program atau proyek pembangunan yang dilakukan di dalam masyarakat lokal. Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan suatu perwujudan dari kesadaran serta kepedulian dan tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya suatu

pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu-hidup mereka. Artinya, dengan adanya partisipasi yang diberikan, berarti masyarakat benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukan hanya sekedar suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh (aparatur) pemerintah sendiri, tetapi juga terdapat keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu-hidupnya.

Paparan definisi-definisi diatas dapat dimaknai secara umum bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan merupakan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan pada suatu daerah tertentu, keterlibatan tersebut baik secara mental, emosi, dan fisik anggota masyarakat. Partisipasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keterlibatan anak putus sekolah di Kabupaten Brebes dalam proses pembangunan pendidikan melalui program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) di Kabupaten Brebes.

2.2.4.2. Dimensi Partisipasi Masyarakat

Dalam penyelenggara pendidikan diperlukan adanya partisipasi dari semua *stakeholder* pendidikan, termasuk masyarakat dan orang tua murid. Hal ini akan mengetahui sudah sejauh mana anggota masyarakat atau kelompok masyarakat tersebut ikut berperan dalam penyelenggaraan pendidikan. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan dapat dimulai dengan pelibatan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, perumusan suatu program, evaluasi program dan terakhir masyarakat dapat menikmati hasil dari program pembangunan pendidikan yang dirancang.

Menurut Subakri dan Sapari (2001) menjelaskan tingkatan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan sebagai berikut:

1. Hanya sekedar menggunakan jasa pelayanan yang tersedia, misalnya orang tua (masyarakat) hanya menyekolahkan anaknya;
2. Masyarakat ikut andil dalam memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga;
3. Peran serta dalam bentuk keikutsertaan, artinya memberikan pembinaan secara pasif apa yang telah diputuskan oleh pihak lain;
4. Peran serta melalui adanya konsultasi mengenai hal-hal tertentu, misalnya kepala sekolah atau komite sekolah berkonsultasi mengenai program kerja sekolah;
5. Keterlibatan dalam memberikan pelayanan tertentu, biasanya sebagai mitra pihak lain;
6. Keterlibatan sebagai pelaksana kegiatan yang telah didegalisasikan, misalnya pihak sekolah meminta bantuan kepada komite sekolah masyarakat untuk memberikan penyuluhan mengenai pentingnya pendidikan.

2.2.4.3. Tingkat Partisipasi

Pada uraian diatas menyebutkan bahwa kegiatan-kegiatan pendidikan pada umumnya tidak akan pernah bisa terlepas dari peran serta masyarakat yang ada di sekitarnya. Karena terdapat hubungan timbal balik, saling mendukung, dan saling menguntungkan antara pendidikan dengan masyarakat. Partisipasi masyarakat memiliki tingkatan-tingkatan dalam proses pembangunan pendidikan, Arstein (1969) menulis dalam sebuah jurnal yang berjudul “*A Leader of Citizen*

Participation". Arstein membagi tingkat partisipasi pendidikan menjadi delapan tingkatan, yaitu:

1. Manipulasi (*Manipulation*)

Pada tingkat ini melibatkan masyarakat secara semu atau hanya sebagai stempel dan hanya sebagai pendukung semu dalam proses pelaksanaan pendidikan. Tujuannya yaitu masyarakat hanya digunakan sebagai formalitas semata serta untuk dimanfaatkan dukungannya.

2. Terapi (*Therapy*)

Pada tingkat ini pemegang kebijakan dalam hal ini yaitu pemegang kebijakan pendidikan. Kaitannya dengan proses partisipasi masyarakat, yaitu pada tingkat ini masyarakat hanya dilibatkan sekedar untuk mengembalikan *trust* (kepercayaan) masyarakat terhadap kebijakan pemerintah pada proses pendidikan.

3. Menginformasikan (*Informating*)

Langkah awal yang sangat penting dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat, yaitu pemberian informasi kepada masyarakat terhadap hak dan tanggung jawab serta pilihan mereka. Akan tetapi, dalam pemberian informasi kepada masyarakat dari pemegang kebijakan seringkali hanya bersifat satu arah, artinya yaitu masyarakat tidak diberikan suatu kesempatan untuk memberikan umpan balik serta masyarakat tidak memiliki power untuk melakukan negosiasi. Sehingga pada tingkatan ini masyarakat hanya pasif dan menunggu informasi mengenai perkembangan

pengelolaan pendidikan yang dilakukan oleh pengelola pendidikan itu sendiri.

4. Konsultasi (*Consultation*)

Pada tingkat ini yaitu meminta pendapat langsung dari masyarakat. Tetapi partisipasi ini merupakan partisipasi yang semu, karena tidak ada jaminan bahwa pendapat mereka akan dapat diperhatikan atau dilaksanakan dalam implementasi. Cara yang sering digunakan dalam tingkat ini yaitu pertemuan warga, jajak pendapat, dan dengar pendapat antara warga masyarakat.

5. *Placation*

Pada tingkat ini masyarakat sudah memiliki beberapa pengaruh walaupun dalam beberapa hal pengaruh tersebut tidak menjamin akan diperhatikan. Masyarakat diperbolehkan untuk memberikan masukan atau mengusulkan beberapa rencana, tetapi tetap pemegang kekuasaan yang berwenang untuk menentukan kebijakan yang akan dilaksanakan.

6. Kerjasama (*Partnership*)

Pada tingkat ini kekuasaan dijalankan melalui negosiasi antara pelaksana satuan pendidikan atau pemerintah pemegang kebijakan dan masyarakat. *Partnership* dapat berjalan secara efektif jika di dalam masyarakat memiliki kekuatan yang terorganisir, memiliki pemimpin yang bertanggung jawab, serta masyarakat yang memahami maksud dan tujuan suatu organisasi yang dilaksanakan.

7. Pelimpahan Wewenang (*Delegated Power*)

Negosiasi antara masyarakat dengan pemerintah dapat mengakibatkan terjadinya dominasi kewenangan kepada masyarakat terhadap rencana atau program tertentu. Pada tahap ini masyarakat lebih banyak berperan dan memiliki kekuasaan dalam memutuskan dan menentukan suatu program pendidikan.

8. Kontrol yang dilakukan oleh warga (*Citizen Control*)

Pada tahap ini masyarakat menginginkan adanya sebuah jaminan bahwa kewenangan untuk mengatur suatu program kegiatan atau kelembagaan yang diberikan kepada mereka, masyarakat akan sepenuhnya bertanggung jawab terhadap kegiatan, kebijakan, dan aspek-aspek manajerial jika ada *stakeholders* yang dapat membantu dalam proses pelaksanaan program-program pendidikan.

Menurut Subakri dan Sapari (2001) menyatakan dalam suatu program tingkat partisipasi masyarakat dapat berupa: 1) Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan atau pengambilan suatu keputusan; 2) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program; 3) Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil; dan 4) Partisipasi masyarakat dalam melakukan evaluasi. Praktik partisipasi yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam pelaksanaan pendidikan akan terjalin sinergi antara warga, pemerintah, sekolah, serta masyarakat dalam membangun kepercayaan sebagai modal yang sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan.

2.2.4.4. Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan

Pada dasarnya masyarakat cenderung berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan, tetapi tidak mudah untuk mengajak masyarakat ikut berpartisipasi. Kenyataan tersebut menguatkan asumsi bahwa partisipasi tidak mudah untuk diwujudkan, karena terdapat hambatan yang bersumber dari masyarakat ataupun dari pemerintah.

Menurut Normina (2016 : 76–78) faktor yang dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam pendidikan dari pihak pemerintah, yaitu:

1. Lemahnya komitmen politik para pengambil keputusan di daerah untuk melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pelayanan publik;
2. Lemahnya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengimplementasikan strategi pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik;
3. Rendahnya kemampuan lembaga legislatif dalam mengaktualisasikan kepentingan masyarakat;
4. Lemahnya dukungan anggaran, seringkali kegiatan partisipasi publik hanya dilihat sebagai proyek, sehingga pemerintah sering kali tidak menjalankan dana secara berkelanjutan.

Sedangkan faktor penghambat partisipasi dari pihak masyarakat muncul karena beberapa hal, yaitu:

1. Adanya budaya paternalism yang dianut oleh masyarakat, sehingga menyulitkan untuk melakukan diskusi secara terbuka;

2. Apatisme karena masyarakat kurang dilibatkan dalam pembuatan suatu keputusan oleh pemerintah daerah;
3. Tidak adanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah;
4. Hambatan kultural, ialah masih adanya sebagian masyarakat yang masih menganggap pendidikan formal bertentangan dengan adat yang dianut oleh mereka, contohnya pada masyarakat Samin yang menganggap bahwa orang yang pintar hanya akan membuat membodohi orang lain;
5. Hambatan geografis, jauhnya lokasi sekolah serta tidak adanya fasilitas transportasi dan akses jalan yang mendukung untuk mencapai ke sekolah;
6. Mahalnya biaya pendidikan, hal ini terjadi pada pendidikan tingkat atas dan perguruan tinggi.

Adapun faktor yang dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pendidikan, antara lain:

1. Pola pikir masyarakat yang semakin maju sehingga menganggap pendidikan sebagai salah satu jalan untuk memudahkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan;
2. Adanya stratifikasi sosial yang menempatkan suatu tingkatan pendidikan sebagai salah satu penentu status sosial pada suatu masyarakat;
3. Adanya pandangan masyarakat menganggap pendidikan sebagai salah satu cara untuk merubah nasib menjadi lebih baik;
4. Fasilitas dan akses untuk menuju ke sarana pendidikan yang memadai, misal sudah banyaknya sekolah yang berada di pelosok desa yang dapat dijangkau oleh masyarakat yang tinggal di daerah terpencil;

5. Sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan yang terus dilaksanakan guna meningkatkan derajat kehidupan masyarakat;
6. Adanya program wajib belajar dari pemerintah;
7. Adanya sekolah kejuruan yang dapat membentuk siswa siap untuk kerja setelah lulus, dan siswa dapat melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi;
8. Adanya program Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang dapat membantu meringankan biaya pendidikan pada tingkat pendidikan;
9. Pemerataan kesempatan dalam memperoleh pendidikan, sehingga semua lapisan masyarakat dapat mengenyam pendidikan bagi usia sekolah;
10. Aksesibilitas artinya setiap orang dapat memiliki akses yang sama dalam memperoleh pendidikan pada semua jenis, jenjang, maupun jalur pendidikan tanpa membedakan asal-usulnya;
11. Persepsi orang tua mengenai pendidikan, persepsi orang tua dapat mempengaruhi aspirasi. Artinya, kemampuan orang tua dalam melihat pentingnya suatu pendidikan akan berpengaruh pada tujuan serta harapan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang.

Menurut Normina (2016) yang dikutip dari Holil (1980 : 10) ada 4 faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat pada suatu program dari unsur luar atau lingkungan, yaitu:

1. Komunikasi yang intensif antara sesama warga masyarakat, antara warga masyarakat dengan pimpinannya, dan antara sistem sosial yang ada di dalam masyarakat dengan sistem di luarnya;

2. Iklim sosial, ekonomi, politik, serta budaya baik yang ada di dalam kehidupan keluarga, pergaulan, sekolah, ataupun di masyarakat yang dapat menguntungkan dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat;
3. Kesempatan untuk berpartisipasi. Keadaan lingkungan, struktur sosial, sistem nilai masyarakat, dan norma-norma yang ada di masyarakat dapat memungkinkan untuk mendorong terjadinya partisipasi sosial;
4. Kebebasan dalam bertindak dan berkreasi. Lingkungan yang ada di dalam keluarga atau lingkungan politik, sosial, dan budaya dapat memungkinkan mendorong timbul dan berkembangnya tindakan atau gagasan baik individu atau kelompok.

2.2.5. Konsep Sosialisasi Pendidikan

Sosialisasi dimaknai sebagai suatu teori peranan (*role theory*). Sosialisasi dibedakan menjadi dua jenis yaitu, (1) sosialisasi primer yang terjadi di dalam keluarga. Sosialisasi primer terjadi pada individu ketika berada pada masa kecil. Hal tersebut diwujudkan dengan belajar untuk menjadi anggota dari suatu masyarakat, yaitu keluarga; dan (2) sosialisasi sekunder yang terjadi dalam masyarakat. Pada sosialisasi sekunder memberikan kepada individu sebuah pengalaman untuk mengenal kelompok lain dalam suatu masyarakat.

Sosialisasi dibedakan atas sosialisasi formal dan informal yang berdasarkan perbedaan standar dan nilainya. Pertumbuhan kepribadian yang dimiliki seorang anak mendapat pengaruh yang besar dari kedua sosialisasi tersebut, sehingga anak akan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku dalam lingkungannya.

Menurut Narwoko dan Suyanto (2006) yang dikutip oleh Wulandari *et al.* sosialisasi formal terdapat di lembaga-lembaga resmi dengan wewenang yang sesuai dengan aturan negara, seperti pendidikan yang dilakukan di sekolah dan pendidikan yang dilakukan di militer. Sedangkan pada sosialisasi informal terdapat pada kegiatan yang dianggap sebagai tempat bersosialisasi secara kekeluargaan, misalnya interaksi yang terjadi antar teman atau sesama anggota di dalam masyarakat sosial.

Agen-agen yang terlibat dalam sosialisasi merupakan pihak-pihak yang menjalankan kegiatan sosialisasi. Agen yang termasuk ke dalam agen sosialisasi utama yaitu keluarga, media massa, lembaga pendidikan di sekolah, dan kelompok bermain. Selain itu, agen lain yang terlibat pada proses sosialisasi yaitu institusi agama, masyarakat, organisasi rekreasional, dan lingkungan pekerjaan. Agen-agen tersebut akan membantu seseorang dalam membangun persepsi tentang dunianya sendiri yang berkaitan dengan sesuatu yang dilakukan. Adapun tujuan sosialisasi menurut Narwoko dan Suyanto (2006) yaitu, (1) Memberikan bekal keterampilan kepada masyarakat untuk dipergunakan di lingkup secara luas. Sehingga sosialisasi yang diberikan dapat digunakan sebagai dasar untuk belajar bersosialisasi agar dapat diterima di lingkungan masyarakat; (2) Untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi individu; (3) Mengembangkan kejiwaan individu agar mampu untuk mengevaluasi diri dengan tepat; (4) Menyerap hal-hal positif yang ada di lingkungan masyarakat.

2.2.6. Konsep Anak Putus Sekolah

Anak merupakan pribadi yang unik serta memiliki ciri yang khas. Meskipun anak dapat bertingkah mengikuti perasaan, pikiran, dan kehendaknya sendiri, pada dasarnya lingkungan yang ada di sekitarnya berpengaruh sangat besar terhadap membentuk perilaku anak. Masa kanak-kanak akhir dimulai pada usia enam tahun sampai kira-kira usia dua belas tahun atau sampai tiba saatnya individu menjadi matang secara seksual. Pada masa ini anak sudah digolongkan sebagai anak usia sekolah, karena pada usia tersebut anak sudah memasuki ke dalam dunia sekolah yang lebih serius. Pada masa ini juga ditandai sebagai perubahan dalam perilaku dan kemampuan, sehingga anak lebih mampu dan siap untuk belajar dibandingkan dengan sebelumnya.

Usia sekolah (*school age*) yang berkisar antara umur 6—12 tahun dapat disebut sebagai masa *industry versus inferior* dimana perkembangan psikososial anak sudah mampu menghasilkan keterampilan atau karya, berprestasi dan berinteraksi. Para pendidik menyebutnya sebagai usia sekolah dasar, yaitu anak memperoleh dasar-dasar pengetahuan serta berbagai keterampilan di sekolah dasar. Pada masa ini merupakan masa pembentukan kebiasaan dorongan untuk berprestasi yang cenderung membentuk sampai dewasa, sehingga pada masa ini sering disebut juga sebagai masa kritis dalam dorongan berprestasi. Masa usia sekolah juga dapat dikatakan sebagai masa untuk belajar maupun matang dalam hal sekolah. Disebut matang untuk belajar karena anak sudah berupaya untuk mencapai sesuatu, sedangkan disebut pada matang untuk sekolah karena anak sudah menamatkan

taman kanak-kanak yang merupakan suatu lembaga persiapan bersekolah dan anak sudah menginginkan hal-hal baru yang dapat diberikan dari sekolah.

2.2.6.1. Pengertian Anak Putus Sekolah

Pengertian anak putus sekolah menurut Yusuufa Ramandana I. S dan I Wayan Sukadana (2016) yang dikutip dari Trismansyah (1998 : 18) mengemukakan bahwa anak putus sekolah, ialah anak yang mengalami kegagalan dalam mengikuti pendidikan di sekolah, sebagai akibatnya anak tersebut putus sekolah sebelum waktunya.

Menurut Ali Imron (2011 : 159) berpendapat dalam bukunya, mendefinisikan anak putus sekolah, yaitu anak yang keluar dari sekolah sebelum waktu yang telah ditentukan atau sebelum ia lulus.

Menurut Mudyaharjo (2001 : 498) berpendapat bahwa putus sekolah ialah meninggalkan sekolah sebelum menuntaskan periode belajar yang telah ditentukan oleh sekolah yang bersangkutan.

Pendapat lain menyatakan bahwa putus sekolah ialah berhentinya pembelajaran seorang siswa di pertengahan atau akhir tahun ajaran, karena berbagai alasan yang mendorong atau mengharuskan siswa untuk berhenti sekolah (Ahmad, 2011 : 86).

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat dimaknai bahwa anak putus sekolah yaitu anak yang tidak bersekolah, putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya, atau telah menyelesaikan tapi tidak melanjutkan ke jenjang

berikutnya yang dikarenakan berbagai alasan yang mengharuskan anak berhenti sekolah.

2.2.6.2. Penyebab Anak Putus Sekolah

Penyebab anak putus sekolah dapat disebabkan oleh beberapa hal, berikut beberapa hal yang menyebabkan anak putus sekolah, yaitu:

1. Peserta didik tidak mampu dalam menyelesaikan pendidikannya. Sehingga ketidakmampuan dalam mengikuti pelajaran merupakan salah satu penyebab anak putus sekolah. Oleh karena itu, mereka harus mendapatkan perlakuan yang khusus dan berbeda dengan peserta didik lainnya.
2. Faktor ekonomi. Hal ini banyak terjadi di daerah-daerah pedesaan dan daerah yang tingkat penduduk miskin yang tinggi. Oleh karena itu, banyak peserta didik putus sekolah karena tidak memiliki biaya sekolah.
3. Mengalami sakit parah. Peserta didik tidak mampu menyelesaikan pendidikannya hingga batas waktu yang tidak dapat ditentukan, karena peserta didik sudah jauh tertinggal dengan peserta didik lainnya sehingga ia memilih untuk tidak bersekolah.
4. Anak-anak yang terpaksa bekerja. Jumlah pekerja anak di negara-negara berkembang sangat banyak. Tidak jarang, anak-anak juga bekerja di sektor formal maupun informal yang terikat oleh waktu serta aturan. Hal ini dapat terjadi karena, kesulitan finansial keluarga yang mengakibatkan meningkatnya jumlah anak putus sekolah dan berpengaruh pada peningkatan jumlah anak yang harus bekerja.

5. Membantu orang tua bekerja di ladang. Anak laki-laki yang tinggal di daerah agraris, dipandang sebagai pembantu terpenting untuk bekerja di ladang. Bekerja di ladang dapat membutuhkan waktu yang relatif banyak, sehingga seringkali menjadikan peserta didik tidak dapat mengikuti pelajaran di sekolah dan memutuskan peserta didik untuk *drop out*.
6. Di-*drop out* oleh sekolah. Hal ini dapat disebabkan karena kemampuan belajar yang rendah atau peserta didik sudah tidak mau belajar. Hal tersebut dapat terjadi karena yang bersangkutan memang sudah tidak mungkin untuk dididik lagi.
7. Peserta didik yang ingin *drop out* atau tidak mau melanjutkan pendidikannya. Pada peserta didik demikian, tidak dapat dipaksa untuk melanjutkan pendidikannya termasuk oleh orang tuanya sendiri.
8. Anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang mengalami kasus pidana untuk beberapa tahun, dapat menjadikan anak tersebut akan *drop out* dari sekolah.
9. Bersekolah tidak menjadi hal yang menarik bagi peserta didik. Hal tersebut dapat menjadikan mereka menganggap lebih baik tidak bersekolah.

Pada kasus-kasus anak putus sekolah tidak selamanya dapat dipecahkan. Dalam artian, ada beberapa kasus anak putus sekolah yang dapat dicegah dan yang tidak dapat dicegah. Pada kasus anak putus sekolah yang dapat dicegah, seperti anak putus sekolah karena kondisi ekonomi dengan jalan keluarnya yaitu memberikan beasiswa. Sedangkan pada kasus peserta didik yang sudah tidak mau

lagi bersekolah, sangat sulit untuk pemecahannya. Maka, amanat wajib belajar dapat dijadikan sebagai acuan untuk menekan angka anak putus sekolah.